

Pilih 3 jurnal yang relevant dengan tema atau judul yang saudara pilih, dan lakukan review terkait hubungannya dengan judul/tema penelitian anda

**NAMA** : FENI YUNIKA  
**NIM** : 202510032

## **Tugas Metodologi Riset**

### **Literatur Review**

- 1. Judul** : Meningkatkan angka partisipasi sebagai upaya menjamin Legitimasi hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tengah Pandemi *Covid-19*
- Peneliti** : Mokhammad Samsul Arif
- Masalah** : Pilkada Serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 oleh sebagian daerah, apalagi di beberapa daerah ada yang masih menerapkan kebijakan PSBB. Di sisi lain, angka partisipasi masyarakat, sangat mungkin akan turun drastis karena masyarakat tidak lagi menempatkan Pilkada sebagai prioritas dibandingkan dengan faktor ekonomi.
- Tujuan** : Untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi covid-19
- Metode** : Analisis Deskriptif
- Hasil** : Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan 2 strategi yaitu opinion leader strategy, strategi ini adalah menggunakan keterlibatan para tokoh agama dan masyarakat dalam mempermudah penetrasi dan kerja para penyelenggara di tingkat desa dan strategi teknis jemput bola Cara ini dapat digunakan oleh para petugas untuk melayani para pemilih yang enggan datang ke TPS karena khawatir wabah Covid-19 khususnya para pemilih dengan klasifikasi usia rentan tertular, serta para pemilih berkebutuhan khusus.
- Kesimpulan** : Untuk mewujudkan Pilkada Serentak ditengah pandemi dengan angka partisipasi yang tinggi, pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker

saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih.

- 2. Judul** : Fungsi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi)
- Peneliti** : Ahmad Saifudin
- Masalah** : Pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 di khawatirkan akan menghambat suksesnya pelaksanaan pilkada
- Tujuan** : mengetahui dan membahas tentang Fungsi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
- Metode** : metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan kelapangan (Field Research)
- Hasil** : Menurut analisis penulis terkait sosialisasi yang dilakukan oleh KPU mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada, dimana masyarakat memahami dan mau berkontribusi menyumbangkan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2020 walaupun peningkatan partisipasi tidak terjadi pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi dan masih ada Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan angka partisipasi Pemilihan Kepala Daerah hal itu tidak lepas karena pemilihan yang dilakukan terjadi pada masa pandemi Covid-19. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan pemahaman dan meningkatkan partisipasi pemilih bisa dikatakan cukup baik dengan peningkatan jumlah partisipasi pemilihan dari tahun sebelumnya.
- Kesimpulan** : keberhasilan fungsi sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi dimasa Pandemi Covid-19 tahun 2020. Karena dampaknya tidak bisa mengumpulkan banyak orang, tapi dengan jumlah yang terbatas tingkat partisipasi setidaknya tidak menurun.

- 3. Judul** : Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia
- Peneliti** : Aprista Ristyawati
- Masalah** : dampak positif dan dampak negatif dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19
- Tujuan** : Untuk mengetahui Dampak positif dan negatif dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh agar pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik
- Metode** : metode penelitian kualitatif
- Hasil** : bahwa tetap terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara. Sedangkan dampak negatifnya antara lain resiko penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan. Upaya-upaya agar Pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik antara lain meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, harus ada komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana, kedisiplinan masyarakat.
- Kesimpulan** : Pilkada tetap dilaksanakan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 di setiap tahapan

NAMA : M Kukuh Dharma Utama

NIM : 202510040

MK : Metodologi Riset

## **Review Jurnal 1**

### **Judul :**

Faktor-Faktor Utama Yang Menentukan Kinerja Karyawan Perusahaan Bumn: Studi Pada PT. PLN (Persero) Area Manado

Kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kunci apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan pada Bank Mandiri. Jenis penelitian dalam studi ini adalah Penelitian Asosiatif yaitu mengukur asosiasi antara dua variabel atau lebih. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor (Confirmatory Faktor Analysis) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel yang memenuhi syarat untuk di analisis lebih lanjut adalah Pelatihan dan Kepemimpinan.

Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan adalah pelatihan dan kepemimpinan. Namun yang memiliki pengaruh paling besar adalah variabel kepemimpinan, variabel yang memiliki pengaruh paling rendah terhadap kinerja karyawan adalah motivasi dan disiplin kerja. Peningkatan IPM ini mencerminkan adanya kemajuan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Indonesia termasuk didalamnya peningkatan kinerja karyawan sebagai pelaku utama industri di negara kita. Pendapatan bersih BUMN menunjukkan tren yang meningkat pada periode tahun 2010-2014 dengan rata-rata sebesar Rp 133,4 triliun. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang membidangi sektor usaha kelistrikan di negara Indonesia. PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan penyedia tenaga listrik yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi hak serta tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan tenaga listrik melalui suatu kuasa usaha.

PLN (Persero), bahwa kinerja perusahaan ini pada tahun 2016 membaik kinerjanya karena mampu membukukan laba bersih. Hal ini disebabkan karena meningkatnya produksi listrik dan beban

usaha perusahaan yang mengalami kenaikan. Peningkatan ini dirasakan selain karena adanya program efisiensi namun juga karena meningkatnya kinerja karyawan. PLN (Persero) Area Manado, peningkatan kinerja karyawan yang berkualitas sesuai dengan standar kinerja perusahaan juga diutamakan. Informasi dari perusahaan menyatakan bahwa pada tahun 2016 telah dilakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan di lingkungan.

PLN (Persero) Area Manado yang menunjukkan hasil bahwa: karyawan yang memiliki kinerja sangat baik sebanyak 55 persen, karyawan dengan kategori kinerja baik sebanyak 36 persen, dan karyawan dengan kinerja buruk sebanyak 1 persen. Dengan motivasi yang diberikan perusahaan dan pimpinan terhadap karyawan maka kinerja seorang karyawan akan meningkat. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. disiplin kerja juga mempengaruhi kinerja karyawan. Begitu juga dengan disiplin kerja, Kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja pegawai, semakin baik kinerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan merupakan faktor yang utama yang diperlukan sebagai alat peringatan terhadap pegawai yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya. Karyawan yang disiplin atau taat kepada peraturan biasanya kinerjanya sangat baik dalam perusahaan. Pengembangan karir dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Seorang karyawan yang memiliki karir yang bagus dalam perusahaan akan semakin menunjukkan kinerjanya. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan.

## **Review Jurnal 2**

Judul

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Cabang Bandung

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT PT Bank Tabungan Negara (Persero), Cabang Bandung. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA).

Data yang dianalisis berasal dari penyebaran kuesioner kepada karyawan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi telah terbukti sebagai variabel moderasi antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di daerah penelitian pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Cabang Bandung. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bandung adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara Pimpinan dan bawahan, menghindari terjadinya konflik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan demikian diharapkan kinerja karyawan bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.

### **Review jurnal 3**

#### **Judul**

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah di Kota Medan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Komitmen Organisasi, Tanggung Jawab Kerja, Disiplin dan Kinerja karyawan

Hasil penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa secara simultan komitmen organisasi, tanggungjawab kerja, disiplin, berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah di Kota Medan Kata kunci: Komitmen Organisasi, Tanggung Jawab Kerja, Disiplin, Kinerja karyawan. Penilaian sumber daya manusia dapat dilihat dari hasil kerja yang telah dilakukannya melalui kinerja yang dihasilkannya. Sehingga dapat dikatakan sumber daya manusia yang efektif itu menghasilkan kinerja yang baik. Pentingnya memperhatikan kinerja karyawan sebab kinerja merupakan salah satu penentu dalam mencapai kinerja perusahaan dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Kinerja setiap karyawan akan berbeda-beda tingkat hasilnya. Dalam ruang lingkup sumber daya manusia, kinerja seseorang karyawan sangat dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang terbaik, baik bagi karyawannya sendiri maupun perusahaan.

Untuk mendapatkan kinerja yang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan, tentunya perlu faktor yang mendukung agar kinerja karyawan yang maksimal dapat tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu : Efektivitas dan Efisiensi, Otoritas dan Tanggungjawab, disiplin, inisiatif. Tanggung jawab kerja adalah bagaimana setiap karyawan atau

individu bekerja berdasarkan wewenang yang diberikan untuk diminta pertanggungjawabannya dalam menjalankan tugas yang diberikan berdasarkan ukuran prestasi kerja yang efisien, efektif dan produktif dalam memicu simulasi kinerja yang tepat dan terpadu. Kinerja karyawan yang diharapkan juga akan dapat tercapai dengan adanya komitmen terhadap organisasi. Komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok organisasi. Sedangkan komitmen organisasi mencerminkan tingkat keadaan di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan terikat pada tujuannya. Selain itu untuk mendapatkan kinerja yang diharapkan, setiap perusahaan perlu menerapkan disiplin bagi setiap sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Dengan disiplin maka setiap tahap dari pelaksanaan aktivitas akan berjalan dengan maksimal, sehingga kinerja yang optimal dapat tercapai.

Disiplin kerja merupakan alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Karyawan yang berkinerja tinggi diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, cekatan mampu menggunakan segala potensinya dengan efektif dan efisien. Capaian kinerja yang diperoleh dapat diukur dengan menetapkan capaian berdasarkan standar penilaian tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan.

Perusahaan penting untuk mengetahui kinerja karyawannya dalam setiap periode agar diketahui informasi hasil yang diperoleh, baik kualitas dan kuantitas output maupun outcome setiap karyawan. Karyawan merupakan unsur sumber daya manusia yang amat penting bagi perusahaan. Kinerja yang dicapai karyawan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Apabila perusahaan mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas maka kinerja yang dicapai perusahaan juga akan semakin meningkat.

Dalam pelaksanaannya perusahaan memerlukan informasi tentang kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang tercapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Selain itu komitmen organisasi sebagai perasan pegawai untuk menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan dan mengakui tujuan, nilai, norma dan standart etika disuatu organisasi dan menyatakan komitmen serta berniat memelihara keanggotaanya dalam organisasi tersebut



Sedangkan komitmen adalah perasaan identifikasi ,keterlibatan dan kesetiaan yang diekspresikan oleh karyawan terhadap perusahaan. Komitmen berarti keinginan karyawan untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia melakukan usaha yang tinggi bagi pencapaian tujuan organisasi.

Terkait hubungannya dengan tema penelitian saya yang berjudul **faktor-faktor yang berhubungan dalam peningkatan kinerja pegawai BUMN studi Pada AirNav Indonesia Cabang Palembang** adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kinerja karyawan salah satunya adalah kepemimpinan yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan.

## Literature Review

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	N. Lisnur Solihah, Vol 1, No.2 Tahun 2020	Upaya Peningkatan Kedisiplinan Guru Melalui Penerapan Absensi Finger Print Di SMP Negeri 1 Cilparay Kabupaten Bandung	Hasil Penelitian menunjukkan penerapan mesin absensi fingerprint sebagai pencatat kehadiran sangat efektif untuk meningkatkan disiplin guru di SMP Negeri 1 Ciparay
2	Ahfas, Cut Zahri Harun Vol 6, No.4 Tahun 2018	Peningkatan Kinerja Tenaga Kependidikan Melalui Implementasi Absensi Sidik Jari	Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan absen fingerprint sudah baik karena adanya peningkatan kedisiplinan pegawai tata usaha semakin meningkat dari segi kuantitas, kualitas dan produktivitas pekerjaan.
3	Ferry Kartawijaya, Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2018	Pengaruh Absensi Fingerprint Terhadap Disiplin Tenaga kependidikan di SMP PGRI 20 Jakarta	Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi yaitu $r=0,389$ berarti menunjukan bahwa adanya hubungan yang positif dan rendah antara absensi fingerprint terhadap kedisiplinan tenaga kependidikan dan guru di SMP PGRI 20 Jakarta. Hal ini memberikan indikasi bahwa absen fingerprint berpengaruh terhadap kedisiplinan

Berdasarkan literature Riview Diatas maka dapat disimpulkan semua jurnal memiliki hasil yang positif dimana absen fingerprint berpengaruh dan dapat meningkatkan disiplin dan kinerja tenaga kependidikan

NO	JUDUL	PENULIS
1	Evaluasi Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan STIE Maiji	Haris Sinurat
2	EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKANLEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ABC DICIKARANG	Farliana Sutariah
3	EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAI MUHAMMADIYAH SINJAI	Nurjannah

## MASALAH DAN TUJUAN

Penurunan jumlah mahasiswa ini juga terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah mahasiswa berjumlah 11 orang, padahal pada tahun sebelumnya (2014 dan 2015) sebanyak 16 orang. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja kampus melalui kualitas pelayanan. Tujuan penelitian adalah dalam upaya menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan STIE MAIJI, serta mengevaluasi tingkat pelayanan yang diberikan oleh STIE MAIJI kepada mahasiswa

PT sebagai organisasi atau institusi penyedia jasa pendidikan hendaknya memperhatikan kepuasan dari mahasiswanya dengan menyediakan jasa yang dilaksanakan semaksimal mungkin, agar mahasiswa menjadi pelanggan pendidikan yang terpuaskan. Sementara rendahnya kualitas PT menyebabkan ketidakpuasan mahasiswa sebagai pelanggan. Mahasiswa yang tidak puas, cenderung memilih mundur atau transfer ke perguruan tinggi lain. Sementara yang tetap bertahan di perguruan tinggi tersebut, tidak akan memberikan pernyataan dukungan kepada calon pelanggan lain setelah lulus

Kepuasan mahasiswa terkait erat dengan kesesuaian antara harapan dan kenyataan dari kualitas pelayanan akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sangat dibutuhkan adanya proses evaluasi. Evaluasi terhadap layanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana yang dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki dan terus mengembangkan pelayanan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terhadap sivitas akademika, termasuk mahasiswa sebagai pengguna. Melalui proses evaluasi yang berkala seluruh bagian yang ada di lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan memiliki kinerja yang profesional dan dapat memberikan pelayanan yang sesuai yang diharapkan oleh mahasiswa. Pelayanan publik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sampai saat ini sudah berjalan lancar, akan tetapi masih belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang diharapkan oleh pengguna jasa khususnya para mahasiswa. Evaluasi dan peningkatan kualitas sangat diperlukan sebagai bentuk pengukuran tingkat keberhasilan layanan untuk mengetahui sebagai mana tingkat kepuasan mahasiswa. Berdasarkan pandangan tersebut peneliti mengangkat judul "Evaluasi Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelayanan Akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan". Penelitian ini memfokuskan pada mahasiswa sebagai objek penelitian

## REVIEW JUDUL 3 JURNAL MENGENAI EVALUASI PELAYANAN

### METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan. Data yang diperlukan akan diperoleh berdasarkan rumusan masalah. Metode ini dipergunakan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mencari gambaran yang sistematis dan fakta yang akurat.

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa STIE MAJIJ sebanyak 50 orang dari berbagai tingkat dan jurusan. Data dihimpun melalui penyebaran instrumen kusioner.

Pengujian instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas

Penelitian ini disusun untuk menggambarkan konsep analisis kepuasan mahasiswa melalui penilaian harapan dan kenyataan kualitas pelayanan pendidikan di kampus dari sisi mahasiswa sebagai pengguna jasa. Analisis kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan di kampus ini diperlukan karena semakin ketatnya persaingan antara politeknik sejenis. Untuk dapat memenangkan kompetisi, kampus ini harus melakukan

perbaikan kualitas berkesinambungan. Perbaikan kualitas ini dapat dimulai dengan menganalisis kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan utama yang merasakan pelayanan pendidikan di kampus ini. Konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan pendidikan di Politeknik ini dilihat dari lima dimensi kualitas pelayanan jasa menurut Parasuraman,

Zeithaml, dan Berry (1988) yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy yang disebut dengan SERVQUAL. Masing-masing dimensi SERVQUAL dituangkan dalam beberapa atribut pertanyaan. Analisis univariat yang dilakukan ialah analisis kesenjangan antara harapan dan kenyataan mahasiswa, analisis tingkat kesesuaian kepuasan akan kualitas pelayanan, serta analisis uji beda

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAI Muhammadiyah Sinjai. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Penelitian

ini dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif

terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Instrumen pengumpulan data berupa angket model skala likert yang terdiri atas dua bagian.

## HASIL PENELITIAN

Hasil konversi nilai berdasarkan rata-rata atau mean dan strandar deviasi diperoleh bahwa sebanyak 11 mahasisiwa atau 22 persen menyatakan sangat puas. Sebanyak 29 mahasiswa atau 58 persen menyatakan puas. Sedangkan responden atau mahasiswa yang menyatakan tidak puas sebanyak 7 oranga atau 14 persen.

Sementara responden yang merasa tidak puas dengan pelayanan kampus STIE MAIJI sebanyak 3 orang atau 6 persen

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa persen kesesuaian terendah adalah jaminan masa depan 91,14% dan persen kesesuaian tertinggi adalah respon EDOM 113,02%. Dimensi pelayanan yang memiliki nilai kesesuaian paling tinggi adalah reliability (103,789%), diikuti dimensi empathy (103,332%).Sementara dimensi pelayanan dengan nilai kesesuaian terendah adalah assurance yakni 95,277%.

Secara umum semua indikator kepuasan dinilai sudah memuaskan dengan nilai indeks rata rata kepuasan aspek sebesar 3,80 atau baik.

Berdasarkan hasil tersebut masih terdapat 1,20 penilaian aspek yang belum memuaskan. Indikator utama yang perlu untuk ditingkatkan adalah informasi akademik dan pelayanan non akademik dalam bentuk website (online)

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh STIE MAJI. Indikator kepuasan yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan oleh STIE MAJI adalah waktu pelayanan administrasi, ketanggapan dosen dalam memecahkan masalah mahasiswa, kerahasiaan informasi akademik, kesediaan diskusi dengan dosen, adanya perhatian dosen, dan penampilan pegawai

Berdasarkan hasil pengujian terhadap data dari 80 responden penelitian, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kenyataan mahasiswa lembaga pendidikan tinggi ABC terhadap kualitas pelayanan akademik mempunyai nilai rata – rata sebesar 3.072 dengan nilai masing – masing aspek sebagai berikut reliability sebesar 3.15, responsiveness sebesar 3.125, assurance sebesar 2.925, empathy sebesar 3.058 dan tangible sebesar 3.102.
2. Tingkat harapan mahasiswa lembaga pendidikan tinggi ABC terhadap kualitas pelayanan akademik mempunyai nilai rata –rata sebesar 3.043 dengan nilai masing – masing aspek sebagai berikut :reliability sebesar 3.035, responsiveness sebesar 3.094, assurance sebesar 3.070, empathy sebesar 2.960 dan tangible sebesar 3,057.
3. Bahwa nilai harapan lebih tinggi dari nilai persepsi. Nilai kualitas pelayanan akademik lembaga pendidikan tinggi ABC adalah 0.039. dengan nilai pada masing – masing dimensi sebagai berikut : reliability sebesar 0.115, responsiveness sebesar 0.031, assurance sebesar 0,145, empathy sebesar 0.099 dan tangible sebesar 0.045. nilai gap negatif pada assurance sebesar -0.145.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAI Muhammadiyah Sinjai sudah memuaskan dengan nilai indeks rata rata sebesar 3,78. Hasil kepuasan ini berarti menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh subbag pendidikan secara umum sudah baik. Rata rata kepuasan berdasarkan aspek menunjukkan bahwa semua sudah puas. Aspek tertinggi adalah aspek assurance sebesar 4,04 dan terendah aspek tangibles sbesar 3,29. Perolehan skor menunjukkan bahwa kepuasan tertinggi diraih oleh mahasiswa Tadris Matematika sedangkan terendah mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab. Kondisi ini bisa jadi dipengaruhi oleh pengalaman dan intensitas dalam hal pelayanan. Pengalaman bisa dibentuk selama mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan



**PRODUKTIFITAS KINERJA PELAKSANAAN WFH (*WORK FROM HOME*) DAN WFO (*WORK FROM OFFICE*)  
DIMASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP MENINGKATNYA REALISASI EFFORT PENERIMAAN PAJAK  
DI KPP MADYA PALEMBANG**

**Jurnal Yang menjadi review :**

1. **Judul : Produktivitas Kerja Saat Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) pada Dosen FKM Universitas Mulawarman di Masa Pandemi Covid-19.**

Link : <https://jkm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/172>

2. **Judul : Implementasi Work From Home Kajian Tentang Dampak Positif, Negatif, dan Produktifitas Pegawai**

Link : <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/281>

3. **Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktifitas Kerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

Link : [https://ejournal.unipas.ac.id/archive-sites/widva\\_amerta/files/WA\\_V1\\_N1\\_Mar%2014/ID\\_02.pdf](https://ejournal.unipas.ac.id/archive-sites/widva_amerta/files/WA_V1_N1_Mar%2014/ID_02.pdf)

4. **Judul : Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemic Perspektif Ketahanan Nasional**

Link : [https://www.google.com/search?q=penerimaan+pajak+covid+jurnal&client=firefox-b-d&ei=IJsWYaaHJsaS9OO8hYaODg&oq=penerimaan+pajak+covid+jurnal&gs\\_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjoHCAAQsAMOHjoJCAAQsAMOCBAeOgYIABAWEB5KBOg6EgExSgOIORgBUK41WKU-YNhAaAFwAHgAgAGTAYgBnOiSAQMwLjiYAOCgAOHIAOnAAOE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiml7qEs67yAhVGSX0KHbyCAeIQ4dUDCA0&uact=5](https://www.google.com/search?q=penerimaan+pajak+covid+jurnal&client=firefox-b-d&ei=IJsWYaaHJsaS9OO8hYaODg&oq=penerimaan+pajak+covid+jurnal&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjoHCAAQsAMOHjoJCAAQsAMOCBAeOgYIABAWEB5KBOg6EgExSgOIORgBUK41WKU-YNhAaAFwAHgAgAGTAYgBnOiSAQMwLjiYAOCgAOHIAOnAAOE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiml7qEs67yAhVGSX0KHbyCAeIQ4dUDCA0&uact=5)



# Evaluasi Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan di Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Prisca Andarini<sup>1</sup>, Widodo Hariyono<sup>1,2</sup>

*Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta<sup>1</sup>  
Pusat Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PS-K3), UAD, Yogyakarta<sup>2</sup>  
E-mail: widodohariyono@yahoo.com, HP: 0818268945*

## Abstrak

Industri jasa konstruksi merupakan sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Untuk itu penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diharapkan menurunkan angka kecelakaan kerja. Banyak proyek konstruksi pemeliharaan jalan yang dilakukan tanpa penerapan K3 standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan K3 pada proyek konstruksi pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 1 tim kerja konstruksi pemeliharaan jalan yang bekerja di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat dilakukannya proyek pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta, yaitu di Jalan Lingkar Selatan, Jalan Wahidin Sudirohusodo, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Data primer diperoleh dengan cara observasi, melakukan wawancara, dan pengisian ceklis.

Hasil penelitian: (1) Penggunaan Alat Pelindung Diri/APD belum dilaksanakan oleh seluruh pekerja konstruksi pemeliharaan jalan. Pada proses pembakaran aspal, dari 7 pekerja hanya 2 yang menggunakan masker dan pakaian kerja. Pada proses pengaspalan, dari 7 pekerja hanya 1 yang menggunakan masker, 3 menggunakan *safety shoes*, dan 7 menggunakan pakaian kerja. (2) Pada proses pelaksanaan konstruksi jalan, pekerjaan tanpa menggunakan Standar Operasional Prosedur/SOP. (3) Pencegahan bahaya atau risiko pada proses konstruksi jalan belum diterapkan sepenuhnya, salah satunya penerapan pemasangan peringatan tanda bahaya di sekitar lokasi proyek. Kesimpulan, pelaksanaan K3 pada konstruksi pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya diterapkan. Pengetahuan K3 perlu ditingkatkan untuk meminimalisir kecelakaan kerja.

Kata kunci: evaluasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, konstruksi, pemeliharaan jalan.

## 1. Pendahuluan

Saat ini pekerjaan proyek konstruksi semakin besar dan kompleks. Besarnya lingkup proyek, dan semakin kompleksnya jenis proyek, jelas melibatkan banyak pihak, dan menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks (Kusumastuti, 2010).

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi (Ariany dkk, 2008). Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik. Diantaranya, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka, dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan terbatas, dinamis, menuntut ketahanan fisik yang tinggi, banyak menggunakan tenaga kerja yang sangat lemah. Akibatnya para pekerja bekerja dengan metoda pelaksanaan konstruksi yang berisiko lebih tinggi (Dinas Permukiman Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, 2008).

Bahaya yang dapat timbul akibat kelalaian pekerja-pekerja yang tidak memerhatikan keselamatan rekan kerjanya. Menurut Wignall (2003), beberapa kejadian yang menyebabkan bahaya tersebut adalah:

1. Menyusuri jalan yang terpaku selama perkerasan. Pada saat papan kayu digunakan untuk menutup jalan, seharusnya paku-paku tersebut dipindahkan atau dipipihkan.
2. Alat-alat yang telah selesai digunakan tidak diletakkan kembali semula.
3. Bekerja dengan menggunakan mesin, tanpa terlebih dahulu memastikan keamanannya.
4. Tidak melaporkan kerusakan mesin atau alat, sehingga tidak selamat bagi orang lain yang menggunakan sesudahnya.
5. Menggunakan material pengganti dan instalasi listrik di bawah standar, kabel-kabel ditinggalkan sembarangan, dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan K3 pada pekerja konstruksi pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara. Subjek penelitian ini adalah kepala tim kerja dan beberapa pekerja konstruksi jalan. Subjek merupakan 1 tim kerja

konstruksi pemeliharaan jalan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah *checklist*. Data primer diperoleh dari wawancara dan *checklist* mengenai Alat Pelindung Diri (APD) dan penerapan pencegahan bahaya. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis univariat yaitu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik pada variabel, yaitu pada penggunaan APD, proses pelaksanaan kerja dan pencegahan bahaya pada konstruksi pemeliharaan jalan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 14 April 2014 di Jalan Lingkar/*Ringroad* Selatan, tepatnya di gudang lokasi pembakaran aspal diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Penggunaan APD di gudang pembakaran

No	Penggunaan APD	Pakai (orang)	Tidak pakai (orang)	Jumlah (orang)
1	Helm proyek	-	7	7
2	Kacamata pelindung	-	7	7
3	Masker	2	5	7
4	Sarung tangan	-	7	7
5	Sepatu <i>safety</i>	-	7	7
6	Pakaian kerja	2	5	7

Berdasarkan tabel 1, pekerja yang menggunakan masker sebanyak 2 orang (28,6%) dan pekerja yang menggunakan pakaian kerja sebanyak 2 orang (28,6%).

Untuk data di lapangan diperoleh saat pekerja melakukan proses pengaspalan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo (sekitar kampus UKDW) sebagai berikut:

Tabel 2. Penggunaan APD pada proses pengaspalan

No	Penggunaan APD	Pakai (orang)	Tidak pakai (orang)	Jumlah (orang)
1	Helm proyek	-	7	7
2	Kacamata pelindung	-	7	7
3	Masker	1	6	7
4	Sarung tangan	-	7	7
5	Sepatu <i>safety</i>	3	4	7
6	Pakaian kerja	7	-	7

Berdasarkan tabel 2, pekerja yang menggunakan masker sebanyak 1 orang (14,3%), pekerja yang menggunakan sepatu *safety* sebanyak 3 orang (42,8%) dan pekerja yang menggunakan pakaian kerja sebanyak 7 orang (100%).

Untuk pencegahan bahaya yang dilakukan selama proses pengaspalan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. Pencegahan bahaya

No	Pencegahan Bahaya	Ya	Tidak
1	Ada tanda peringatan bahaya dipasang di lapangan	ya	-
2	APD dalam keadaan baik	-	Tidak
3	Tersedia fasilitas P3K	-	Tidak
4	Alat kerja dalam kondisi baik	Ya	-

Berdasarkan tabel 3, pencegahan bahaya yang diterapkan pada saat proses kerja di lapangan adalah adanya pemasangan tanda bahaya di lapangan dan kondisi peralatan kerja dalam keadaan baik.

Sebagai pembandingan antara proyek pertama, maka peneliti melakukan penelitian lagi pada proyek kedua yang lebih besar, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (selatan Diklat PU, Kotagede). Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama 2 hari dari tanggal 21 - 22 April 2014 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. Penggunaan APD di gudang pembakaran

No	Penggunaan APD	Pakai (orang)	Tidak pakai (orang)	Jumlah (orang)
1	Helm proyek	-	10	10
2	Kacamata pelindung	-	10	10
3	Masker	4	6	10
4	Sarung tangan	-	10	10
5	Sepatu <i>safety</i>	-	10	10
6	Pakaian kerja	10	-	10

Berdasarkan tabel 4, pekerja yang menggunakan masker sebanyak 4 orang (57,1%) dan pekerja yang menggunakan pakaian kerja sebanyak 10 orang (100%).

Untuk data di lapangan diperoleh saat pekerja melakukan proses pengaspalan di Jalan Perintis Kemerdekaan (selatan Diklat PU, Kotagede) sebagai berikut:

Tabel 5. Penggunaan APD pada proses pengaspalan

No	Penggunaan APD	Pakai (orang)	Tidak pakai (orang)	Jumlah (orang)
1	Helm proyek	-	10	10
2	Kacamata pelindung	-	10	10
3	Masker	4	6	10
4	Sarung tangan	-	10	10
5	Sepatu <i>safety</i>	4	6	10
6	Pakaian kerja	10	-	10

Berdasarkan tabel 5, pekerja yang menggunakan masker sebanyak 4 orang (57,1%), pekerja yang menggunakan sepatu *safety* sebanyak 4 orang (57,1%) dan pekerja yang menggunakan pakaian kerja sebanyak 10 orang (100%).

Dan untuk pencegahan bahaya yang dilakukan selama proses pengaspalan di Jalan Perintis Kemerdekaan (selatan Diklat PU, Kotagede), diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 6. Pencegahan bahaya

No	Pencegahan Bahaya	Ya	Tidak
1	Ada tanda peringatan bahaya dipasang di lapangan	ya	-
2	APD dalam keadaan baik	-	Tidak
3	Tersedia fasilitas P3K	-	Tidak
4	Alat kerja dalam kondisi baik	Ya	-

Berdasarkan tabel 6, pencegahan bahaya yang diterapkan pada saat proses kerja di lapangan adalah adanya pemasangan tanda bahaya di lapangan dan kondisi peralatan kerja dalam keadaan baik.

### 3.2. Pembahasan

#### 3.2.1. Penggunaan APD

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan, No. 004/ BM/2006 (Dinas Permukiman Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, 2008), yang disebutkan bahwa perlengkapan kerja standar untuk melindungi pekerja dalam melaksanakan tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. *Safety hat*, yang berguna untuk melindungi kepala dari benturan benda keras selama mengoperasikan atau memelihara mesin-mesin.
2. *Safety shoes*, yang akan berguna untuk menghindarkan terpeleset karena licin atau melindungi kaki dari kejatuhan benda keras dan sebagainya.
3. Kaca mata keselamatan, terutama dibutuhkan untuk melindungi mata pada lokasi pekerjaan yang banyak serbuk metal atau serbuk material keras lainnya.
4. Masker, diperlukan pada medan yang berdebu meskipun ruang operator telah tertutup rapat, masker ini dianjurkan tetap dipakai.
5. Sarung tangan, dibutuhkan pada waktu mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan yang lebih keras.

Sementara dari hasil penelitian yang diperoleh, alat pelindung diri yang digunakan para pekerja konstruksi pemeliharaan jalan adalah masker, sepatu safety dan pakaian kerja. Selain itu jumlah pekerja konstruksi pun jauh lebih banyak yang tidak menggunakan APD. Hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas penunjang terutama alat pelindung diri bagi setiap pekerja, baik itu dari Dinas Kimpraswil sendiri maupun dari Bidang Bina Marga.

Padahal dalam Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan No. 004/ BM/2006 (Dinas Permukiman Prasarana Wilayah Kota

Yogyakarta, 2008), disebutkan bahwa perusahaan penyedia jasa konstruksi memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut antara lain:

1. Mengusahakan agar tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja serta tata cara kerja diatur sedemikian rupa, sehingga tenaga kerja terlindungi dari risiko kecelakaan.
2. Penyedia jasa menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-alat lain yang akan digunakan atau dibutuhkan sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, selanjutnya barang-barang tersebut harus dapat dipergunakan secara selamat dan sehat.

#### 3.2.2. Proses Kerja

Proses pelaksanaan kerja yang baik adalah mengikuti standar operasional yang sudah ditetapkan sehingga dapat meminimalisir potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Pada pekerja konstruksi pemeliharaan jalan ini, para pekerja bekerja tanpa menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Mereka bekerja berdasarkan instruksi dari kepala tim. Namun proses pelaksanaan konstruksi yang dilakukan mulai dari sistem pembakaran sampai pada tahap pengaspalan sudah mengikuti standar yang berlaku.

#### 3.2.3. Penerapan Pencegahan Bahaya

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan bahaya atau kecelakaan yang dilakukan pekerja konstruksi pemeliharaan jalan adalah sebagai berikut:

1. Pemasangan peringatan tanda bahaya.
 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pemasangan peringatan tanda bahaya hanya dilakukan pada saat proses pengaspalan jalan saja dan itupun hanya ada 1 peringatan tanda bahaya. Sementara pada proses pembakaran aspal di lapangan tidak dilakukan pemasangan peringatan tanda bahaya. Peringatan tanda bahaya ini sangat penting dilakukan terutama tanda jalur evakuasi pada proses pembakaran di gudang. Apabila kecelakaan kerja terjadi seperti bahaya kebakaran akan lebih cepat untuk melakukan tindakan penyelamatan dengan mengikuti tanda evakuasi tersebut sehingga korban dapat diminimalisir.
2. Pemeriksaan alat-alat berat konstruksi.
 

Alat-alat berat konstruksi pemeliharaan jalan ini selalu diperiksa oleh petugas secara rutin (beberapa bulan sekali). Tujuan pemeriksaan ini dilakukan adalah untuk mengetahui kondisi alat sebelum digunakan dalam proyek. Sehingga alat yang mengalami kerusakan tidak digunakan saat proyek berlangsung. Hal ini dapat mengurangi potensi bahaya yang dapat terjadi saat proses konstruksi berlangsung.
3. Penggunaan APD bagi pekerja.

Meskipun belum secara keseluruhan pekerja menggunakan APD, APD juga dipakai sebagai upaya terakhir dalam melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa (*engineering*) dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik.

Pencegahan bahaya yang belum diterapkan oleh pekerja konstruksi pemeliharaan jalan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan, (Dinas Permukiman Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, 2008), yaitu:

1. Tidak tersedia fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).  
Baik itu dari pihak penyedia jasa ataupun dari pihak si pekerja itu sendiri tidak ada yang menyiapkan fasilitas P3K. Padahal fasilitas P3K adalah salah satu hal yang penting dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan. Fungsi P3K ini adalah untuk mengobati para pekerja yang terluka atau mengalami kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan proyek jalan berlangsung. Adanya persiapan P3K dimaksudkan untuk melakukan pertolongan pertama terutama pada kecelakaan besar agar luka dapat diobati terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan infeksi yang lebih besar pada korban.
2. Para pekerja konstruksi pemeliharaan jalan tidak mendapat pelatihan khusus mengenai K3.  
Pekerja yang bekerja sebagai konstruksi pemeliharaan jalan ini, direkrut bagi siapa saja yang mendaftar untuk bekerja tanpa memberikan persyaratan mengenai keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang. Setelah para pekerja diterima untuk bekerja, mereka tidak diberi pelatihan khusus mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Mereka dianggap sudah mampu melakukan pekerjaan tersebut. Padahal semua jenis pekerjaan tentu memiliki bahaya tersendiri. Seharusnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu terutama mengenai K3 pada pekerjaan mereka. Apa saja perlengkapan yang harus dilakukan untuk menghindari bahaya atau risiko di tempat kerja, cara mereka bekerja dengan aman, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat bekerja, dan lain-lain.

#### 3.2.4. Penerapan Ergonomi Pada Pekerja

Selain memerhatikan K3 pada pekerja konstruksi pemeliharaan jalan, ergonomi dalam bekerja juga perlu diperhatikan. Ergonomi juga dapat memengaruhi proses kerja seseorang (Suma'mur, 2001). Contohnya:

1. Pekerja yang mengangkat pasir menggunakan sorong, tentunya akan lebih ergonomi daripada mengangkat pasir menggunakan ember. Hal ini tentunya akan memudahkan pekerja dalam

melakukan pekerjaannya dan membuat si pekerja tidak cepat lelah karena alat kerja yang digunakan sesuai dengan beban kerja yang diangkut.

2. Pada saat proses pembakaran para pekerja bekerja menggunakan pengaduk aspal yang terbuat dari kayu dan dalam bentuk yang panjang. Alat ini sudah diperhitungkan ergonominya terhadap si pemakai. Karena si pemakai akan bekerja di tempat yang panas, tentu mereka tidak menggunakan besi melainkan kayu yang tidak dapat menghantarkan panas. Sementara tongkat panjangnya pengaduk disesuaikan dengan tinggi badan pemakainya, sehingga pemakai tidak kesulitan dalam bekerja nanti, dan lain-lain.

Ilmu ergonomi juga penting untuk diperhatikan karena ergonomi suatu alat dapat memengaruhi keselamatan bagi pemakainya. Alat yang tidak tepat digunakan akan menimbulkan potensi bahaya kecelakaan saat bekerja.

## 4. Kesimpulan

### a. Simpulan

- 1) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja konstruksi pemeliharaan jalan masih tergolong rendah.
- 2) Proses pelaksanaan konstruksi pemeliharaan jalan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.
- 3) Pencegahan bahaya yang sudah diterapkan saat pelaksanaan konstruksi pemeliharaan jalan berlangsung adalah pemasangan peringatan tanda bahaya, pengecekan alat-alat berat secara rutin dan penggunaan APD bagi pekerja.

### b. Saran

Kepada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta/Bidang Bina Marga: Lebih memerhatikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja konstruksi pemeliharaan jalan dan menyiapkan SOP konstruksi pemeliharaan jalan.

## Ucapan Terima Kasih

Kepada Kepala Pusat Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PS-K3) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, diucapkan terima kasih atas bantuan pendanaan dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Ariany, K., Sanjaya, M., dan Widayawati. 2008. Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Gedung di Kabupaten Klungkung dan Karangasem. *Jurnal Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil*. Universitas Udayana, Volume 8, Nomor 1, Hal 1 – 8.
- Dinas Permukiman Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta. 2008. *Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk*

*Konstruksi Jalan dan Jembatan, Nomor 004/BM/2006.* Yogyakarta.

- Kusumastuti, D.R. 2010. Aplikasi Sistem Manajemen Konstruksi pada Pembangunan Gedung Komersial Plaza Dago. *Jurnal Teknis*. Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, Volume 5, Nomor 2, halaman 64 – 70.
- Suma'mur P.K. 2001. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. CV Haji Masagung, Jakarta.
- Wignall, A., Kendrick, S.P., Ancill, R., dan Copson, M. 2003. *Proyek Jalan: Teori dan Praktik*. Erlangga, Jakarta.

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM K3 TERHADAP KINERJA PROYEK JALAN TOL CIJAGO SEKSI 2B

Yunika<sup>1✉</sup>, Haryono Putro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Gunadarma, Teknik Sipil, Jl. Margonda Raya, No. 100, Pondok Cina, Depok, Jawa Barat  
16424

✉ e-mail: yunika.yunika0106@gmail.com

### Abstract

*Recognizing the importance of occupational safety and health (K3) in order to provide a sense of security and prevent work accidents so as to increase morale or performance of other workers. The study discusses the effect of the application of occupational safety and health (K3) on the performance of construction project workers. Companies are requested to immediately apply the new Occupational Safety and Health (K3) standards as stated in the Minister of Manpower Regulation (Permenaker) No.5 of 2018 concerning K3. Employers and Management who do not meet the provisions in this Ministerial Regulation are subject to sanctions in accordance with the Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety and Law Number 13 of 2003 concerning Employment. On this occasion the researchers used quantitative methods and the research was conducted at the Cijago Depok toll road during working hours. The average weighting value is 84%, so it can be said that the application of the safety management system and occupational health (SMK3) on the Cijago toll road section 2 B project has been running quite well and effectively. However, in this study, several variables have the lowest score and can affect project performance. Therefore, these variables will be given preventive variables including is variable which has a weight of <76%, namely: X13 which is a variable with the statement "The company presents the results of measurements of noise, vibration, temperature, dust to ensure the implementation of K3 is going well and correctly" therefore according to expert opinion there is a need for preventive measures. The variable that can affect project performance is the variable that has the highest weighting, X17 regarding "OHS regulations and procedures needed" with a weighting of 89% means that project performance is influenced by project workers who feel safe if there are OHS regulations and procedures required that are clearly described and as evidenced by the increase in the S curve*

**Keywords:** System K3 , APD , Employment

### Abstrak

*Menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar dapat memberi rasa aman dan mencegah kecelakaan kerja sehingga dapat meningkatkan semangat ataupun kinerja para pekerja lainnya. Penelitian membahas mengenai pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja pekerja proyek konstruksi. Perusahaan-perusahaan diminta segera menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5 Tahun 2018 tentang K3.Pengusaha dan Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dalam kesempatan kali ini Peneliti menggunakan metode kuantitatif dan penelitian dilaksanakan di tol Cijago Depok pada jam kerja Nilai bobot rerata 84% maka dapat dikatakan bahwa penerapan system Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek jalan tol cijago seksi 2 B ini telah berjalan Cukup Baik dan Efektif Namun dalam penelitian ini telah didapat beberapa variable yang mempunyai nilai skor terendah dan dapat mempengaruhi kinerja proyek oleh sebab itu variable tersebut akan diberikan tindakan preventive variable yang termasuk adalah variable yang memiliki bobot < 76% yaitu : X13 dimana adalah variable dengan keterangan " Perusahaan memaparkan hasil pengukuran kebisingan, getaran, suhu, debu untuk memastikan pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dan benar" oleh*

*sebab itu berdasarkan pendapat pakar perlu adanya tindakan preventive Sedangkan diketahui ada bobot variable yang dapat mempengaruhi kinerja proyek yaitu variable yang mempunyai bobot paling besar yaitu X17 tentang “Peraturan dan prosedur K3 sangat diperlukan” dengan bobot 89% artinya kinerja proyek dipengaruhi oleh pekerja proyek yang merasa aman jika ada peraturan dan prosedur K3 yang diperlukan dengan jelas dipaparkan dan terbukti dengan peningkatan di kurva S*

**Kata Kunci :** Sistem K3 , APD , Ketenagakerjaan

## **Pendahuluan**

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai salah satu aspek perlindungan tenaga kerja memiliki peran yang besar dalam upaya meningkatkan produktivitas perusahaan (Sutjana, 2006:144). Menurut Mangkunegara (2002:142), keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya. Untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu diperlukannya sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) agar angka kecelakaan kerja dapat diminimalisir.

Pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja juga berguna agar tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja, mengembangkan konsep dan kebiasaan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, memahami ancaman bahaya yang ada di tempat kerja dan menggunakan langkah pencegahan kecelakaan kerja. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Anas Zaini Z Iksan selaku Ketua Umum Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (A2K4) mengatakan setiap tahun terjadi

96.000 kasus kecelakaan kerja. Jumlah ini, sebagian besar kecelakaan kerja terjadi pada proyek jasa konstruksi dan sisanya terjadi di sektor industri manufaktur.

Perusahaan-perusahaan diminta segera menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2018 tentang K3. Pengusaha dan Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia harus mengutamakan aspek perlindungan pekerja dengan menerapkan standar K3 di lingkungan kerja untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (PPK dan K3) Sugeng Priyanto.

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Menganalisis penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada Proyek Jalan Tol Cijago Seksi 2B

- pada PT. Utama Karya Infrastruktur di Kota Depok
2. Menganalisis faktor penghambat dan faktor pendorong dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada Proyek Jalan Tol Cijago Seksi 2B pada PT. Utama Karya Infrastruktur di Kota Depok
  3. Menganalisis tindakan preventive yang dapat dilakukan untuk Variable terendah pada system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada Proyek Jalan Tol Cijago Seksi 2B pada PT. Utama Karya Infrastruktur di Kota Depok

### ***Batasan Masalah***

Batasan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan ini dilakukan pada jam kerja efektif (*office hours*) jam 8- jam 5 sore dengan istirahat satu jam di jam 12
2. Penelitian dilakukan hanya di Kinerja Proyek Jalan Tol Cijago Seksi 2B pada PT. Utama Karya Infrastruktur di Kota Depok

### ***Kesehatan Kerja***

Kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh perusahaan. Karena dengan adanya program kesehatan kerja yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen dikarenakan sakit akibat tertular teman sekerja atau luar teman sekerja. Bekerja dengan lingkungan yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama dan meningkatkan kinerja lebih baik lagi.

### ***Keselamatan Kerja***

Keselamatan kerja adalah kondisi kerja yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja, serta usaha – usaha yang dapat menjamin keadaan dan kesempurnaan pekerja (baik jasmani maupun rohani) beserta hasil karyanya dan alat – alat kerjanya ditempat kerja. Usaha – usaha tersebut haru dilakukan oleh semua unsur – unsur yang terlibat dalam proses kerja yaitu pekerja itu sendiri, pengawas, perusahaan, pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Tanpa ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut mustahil keselamatan kerja dapat diwujudkan secara maksimal (Bambang, 2004)

### ***Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)***

Manajemen kesehatan dan keselamatan kerja tidak terlepas pembahasan manajemen secara umum karena manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari manajemen secara keseluruhan. Adapun unsur-unsur manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terdiri dari manusia material atau bahan-bahan, mesin dan peralatan, dana dan metode secara garis besar dengan prinsip pemecahan masalah yang dianut maka unsur-unsur dapat berupa sumber bahaya apabila tidak memenuhi persyaratan yang diterapkan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER.05/MEN/ 1996, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi , perencanaan ,tanggung jawab , pelaksanaan , prosedur , proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan , penerapan, pencapaian , pengkajian , pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam



rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya kerja yang aman, efisien, produktif. Sistem manajemen harus diterapkan di kontraktor yang sistem kerjanya berpotensi mengandung banyak bahaya

### ***Peraturan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)***

Secara umum kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Sebenarnya, setiap kecelakaan kerja dapat diramalkan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan. Karena itu, kewajiban berbuat secara selamat, dan mengatur peralatan dan perlengkapan produksi sesuai dengan standar yang diwajibkan oleh Undang-Undang adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Undang-Undang Keselamatan Kerja, Lembaga Negara Nomor 1 tahun 1970 adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja yang berlaku secara nasional diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan merupakan induk dari seluruh peraturan keselamatan kerja yang berada dibawahnya. Meskipun judulnya disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja sesuai dengan bunyi Pasal 18 namun materi yang diatur termasuk masalah kesehatan kerja.

### ***Pengertian Kinerja***

Menurut Prawirosentono (1999) yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kinerja sumber daya manusia (SDM) merupakan istilah yang berasal dari kata *job performance* (prestasi kerja atau

prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Menurut Mangkunegara (2002:67) kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Martoyo (2000:92) kinerja merupakan penampilan kerja seseorang itu sendiri dan taraf potensi seseorang dalam upayanya mengembangkan diri untuk kepentingan perusahaan dan organisasi. Jadi, kinerja merupakan hasil atau output tersebut berasal dari kerja karyawan, maka hal itu dinamakan kinerja karyawan. Dan jika *output* tersebut berasal dari pengusaha.

### ***Metode Penelitian***

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuantitatif untuk mengetahui standar sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek tersebut yang sudah diterapkan dan dilaksanakan kontraktor untuk kinerja proyek.

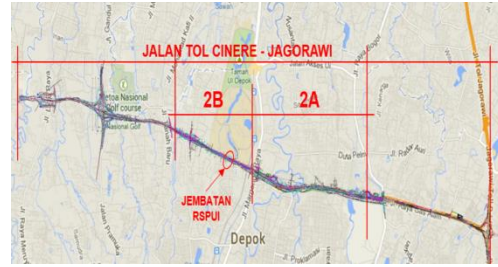
### ***Penyebaran Kuesioner***

Penyebaran kuisisioner disebarkan kepada responden yang terdiri dari tim kontraktor, tenaga kerja, konsultan pengawas serta tim K3&LH PT Hutama Karya. Dimana struktur kuisisioner terbagi dalam tiga bagian :

- a) Profil responden Berisi mengenai informasi identitas responden yaitu nama, pendidikan terakhir, umur, dan jabatan (spesifikasi pekerjaan).
- b) Petunjuk Pengisian Kuesioner Pada bagian ini, responden diberi petunjuk pengisian kuesioner, sehingga responden tidak salah

dalam pengisian jawaban kuesioner.

- c) Kuesioner Pertanyaan yang digunakan adalah jenis pertanyaan tertutup untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan dan memfokuskan jawaban yang diharapkan penulis.



**Gambar 1.** Peta Jalan Tol Cinere-Jagorawi

### ***Sampel Penelitian***

Sampel penelitian ini adalah staff dan pekerja pada kontraktor utama yang ikut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner untuk responden. Kuesioner untuk responden tersebut disebar pada survey di bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, dengan banyaknya responden sebesar 39 orang.

### ***Lokasi dan Waktu Penelitian***

- a. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian bertempat pada Proyek jalan Tol Cijago Seksi 2B
- b. Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan pada Office Hour ( Pukul 08:00 – Pukul 17:00) dengan 1 jam istirahat (jam 12)

### ***Lokasi Penelitian***

Jalan Tol Cijago (Cinere – Jagorawi) seksi 2B merupakan bagian dari *Jakarta Outer Ring Road II* (JORR II) yang mana Jalan Tol ini menghubungkan Jalan Tol Cijago Seksi 2A dengan Jalan Tol Cijago Seksi 3. Pembangunan Jalan Tol ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah serta untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa transportasi dan distribusi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Lokasi proyek Jalan Tol Cijago Seksi 2B terletak antara Jl. Margonda Raya dengan Jl. Kukusan Raya, Kota Depok

Metode yang digunakan untuk mengukur analisis penerapan SMK3 proyek terhadap pelaksanaan proyek yaitu dengan menggunakan metode pembobotan atau scoring. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor (memberikan angka) yang diperoleh dari angka-angka dari setiap pertanyaan yang telah dijawab oleh responden dengan benar, dengan mempertimbangkan bobot (Jula Nujhani, 2013). Adapun analisis data menggunakan Skala Likert. Pertanyaan pada kuesioner yang disebarkan menjadi indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Hasil penilaian kuesioner dari responden yang telah dibuatkan tabulasi data, selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Bayu, widhiawati, andyana, 2015)

$$\text{Skor} = \frac{\text{Total Skor (A)}}{\text{Nilai Total B}} \times 100\%$$

Dimana :

$$\text{Total Skor (A)} = \text{Total nilai skor 1-5}$$

$$\text{Nilai Total (B)} = \text{Total Nilai Skor Maksimum}$$

Dalam penelitian ini sistem skor yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Skor 1 STS (Sangat Tidak Setuju)

2. Skor 2 TS (Tidak Setuju)
3. Skor 3 N (Netral)
4. Skor 4 ST (Setuju)
5. Skor 5 SS (Sangat Setuju)

Dari hasil nilai skor yang didapat, maka hasil kesimpulan sebagai berikut :

- a. SS : Sangat Setuju diberi skor 5 (Persentase 81% sampai dengan 100%)
- b. ST : Setuju diberi skor 4 (Persentase 61% sampai dengan kurang dari  $\leq$  80%)
- c. RG : Ragu-ragu diberi skor 3 (Persentase 41% sampai dengan kurang dari  $\leq$  60%)
- d. TS : Tidak setuju diberi skor 2 (Persentase 21% sampai dengan kurang dari  $\leq$  40%)
- e. STS : Sangat tidak setuju diberi skor 1 (Persentase kurang dari  $\leq$  20%)

Hasil akhir yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan range yang telah ditentukan. Hasil akhir merupakan angka dari keefektifan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) terhadap pelaksanaan proyek peningkatan kapasitas landasan terbang Bandar Udara Soekarno-Hatta. Adapun tabel klasifikasi keberhasilan SMK3, sebagai berikut :

**Tabel 1.** Klasifikasi Keberhasilan SMK3 dengan metode Scoring

Range Nilai Total	Keterangan
$X \geq 95$	SMK3 Proyek berhasil dengan sangat baik dan efektif
$75 \leq X \leq 95$	SMK3 Proyek Cukup baik dan efektif
$50 \leq X \leq 75$	SMK3 Proyek kurang baik

$X \leq 50$	SMK3 Proyek Belum berhasil/gagal
-------------	----------------------------------

Sumber : Klasifikasi metode pembobotan (scoring) (Jula Nujhani 2013)

Penilaian interpretasi responden terhadap item pertanyaan kuesioner adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus index %, sebagai berikut :

$$\text{Rumus Index \%} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi}}{X} \times 100\%$$

Sedangkan Rumus yang dipakai untuk menentukan jumlah responden adalah rumus slovin. Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus slovin ini biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi.

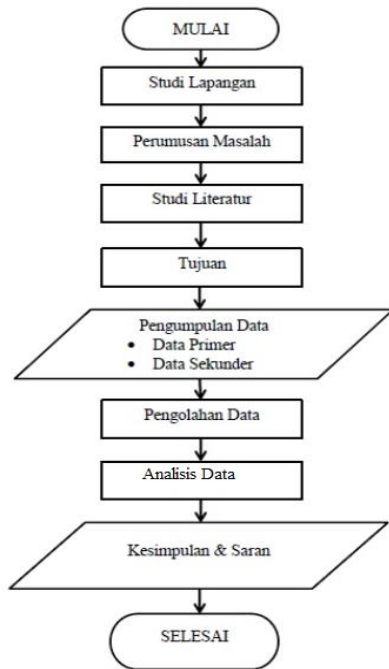
$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Dari notasi diatas, n adalah jumlah sampel minimal, nilai N adalah populasi sedangkan nilai e adalah error margin.

Berangkat dari ide perihal margin error inilah mungkin sang pencipta dari rumus ini memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk menetapkan besar sampel minimal berdasarkan tingkat kesalahan atau margin of error.

Misalnya sebuah penelitian dengan derajat kepercayaan 95%, maka tingkat kesalahan adalah 5%. Sehingga peneliti dapat menentukan batas minimal sampel yang

dapat memenuhi syarat margin of error 5% dengan memasukkan margin error tersebut ke dalam formula atau rumus slovin.



Gambar 2. Alur Metode Penelitian

**Hasil dan Pembahasan**

***Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja***

Tabel 2. Presentase Bobot Variabel Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

NO	VARIABEL	SKOR	BOBOT
1	X1	155	86%
2	X2	156	87%
3	X3	145	81%
4	X4	151	84%
5	X5	153	85%
6	X6	150	83%
7	X7	148	82%
8	X8	146	81%
9	X9	146	81%
10	X10	148	82%
11	X11	141	78%
12	X12	152	84%
13	X13	135	75%
14	X14	143	79%
15	X15	145	81%
16	X16	139	77%
	RATA-RATA		82%

Karena nilai bobot mempunyai skor 82%, maka dapat dikatakan bahwa responden sangat setuju dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di proyek jalan tol Cijago seksi 2B

***Peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja***

Tabel 3. Presentase Bobot Variabel Peraturan dan Prosedur Keselamatan dan kesehatan kerja

NO	VARIABEL	SKOR	BOBOT
17	X17	161	89%
18	X18	152	84%
19	X19	140	78%
20	X20	145	81%
21	X21	140	78%
22	X22	151	84%
23	X23	155	86%
	RATA-RATA		83%

Hasil dari rata rata bobot iterpretasi Peraturan dan prosedur Keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 83% menunjukkan bahwa Kontraktor Utama Karya sudah dapat menerapkan peraturan dan prosedur keselamatan dengan baik dan sesuai

***Komitmen Management terhadap kesehatan dan keselamatan kerja***

Tabel 4. Presentase Bobot Variabel Komitmen Managemen terhadap kesehatan dan keselamatan

NO	VARIABEL	SKOR	BOBOT
24	X24	155	86%
25	X25	150	83%
26	X26	151	84%
27	X27	151	84%
	RATA-RATA		84%

Hasil bobot 84% menunjukkan bahwa komitmen yang dijalankan perusahaan sangat baik dan responden menyetujui hal tersebut

***Lingkungan Kerja***

**Tabel 5.** Presentase Bobot Variabel Lingkungan Kerja

NO	VARIABEL	SKOR	BOBOT
42	X42	157	87%
43	X43	154	86%
44	X44	161	89%
45	X45	154	86%
	RATA-RATA		87%

Lingkungan kerja yang tercipta juga dapat dikatakan lingkungan kerja yang nyaman dan membuat para pekerja atau responden bisa bekerja dengan baik dengan dukungan tempat kerja yang baik ini terbukti dari hasil pembobotan sebesar 85%

### ***Keterlibatan Pekerja***

**Tabel 6.** Presentase Bobot Variabel Lingkungan Kerja

NO	VARIABEL	SKOR	BOBOT
35	X35	142	79%
36	X36	159	88%
37	X37	155	86%
38	X38	152	84%
39	X39	139	77%
40	X40	145	81%
41	X41	142	79%
	RATA-RATA		82%

Untuk keterlibatan pekerja dinilai cukup baik dan terbukti bahwa proyek ini dapat bekerjasama dengan baik dengan pekerja dengan hasil bobot 82%

### ***Evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja***

**Tabel 7.** Presentase Bobot Variabel Evaluasi dan Kesehatan Kerja

NO	VARIABEL	SKOR	BOBOT
28	X28	161	89%
29	X29	149	83%
30	X30	149	83%
31	X31	158	88%
32	X32	150	83%
33	X33	149	83%
34	X34	153	85%
	RATA-RATA		85%

Hasil bobot yang mencapai 87% menunjukkan bahwa pihak perusahaan cukup serius dalam evaluasi Kesehatan dan keselamatan kerja di proyek

### ***Hasil Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)***

Rekapitulasi hasil Analisis penerapan system Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek Jalan tol Cijago Seksi 2 B adalah sbb :

**Tabel 8.** Tabel Presentase Bobot Variabel

NO	VARIABEL	BOBOT
1	Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja	82%
2	Peraturan dan Prosedur keelamatan dan kesehatan kerja	83%
3	Komitmen Management terhadap kesehatan dan keselamatan kerja	84%
4	Lingkungan Kerja	85%
5	Keterlibatan Pekerja	82%
6	Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	87%
	Rata-Rata	84%

Dengan nilai bobot rerata 84% maka dapat dikatakan bahwa penerapan system Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek jalan tol cijago seksi 2 B ini telah berjalan Cukup Baik dan Efektif Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa penerapan system K3 yang baik ini dapat meningkatkan kinerja proyek.

Namun dalam penelitian ini telah didapat beberapa variable yang mempunyai nilai skor terendah dan dapat mempengaruhi kinerja proyek oleh sebab itu variable tersebut akan diberikan tindakan

preventive variable yang termasuk adalah variable yang memiliki bobot > 76% yaitu : X13 dimana adalah variable dengan keterangan ” Perusahaan memaparkan hasil pengukuran kebisingan, getaran, suhu, debu untuk memastikan pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dan benar” oleh sebab itu berdasarkan pendapat pakar perlu adanya tindakan preventive berupa :

1. Hasil test dibuat dalam bahasa yang mudah dimengerti sehingga bisa dimengerti oleh pekerja
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai hal ini
3. Adanya pengawasan dan himbauan mengenai variable ini

Sedangkan diketahui ada bobot variable yang dapat mempengaruhi kinerja proyek yaitu variable yang mempunyai bobot paling besar yaitu X17 tentang “Peraturan dan prosedur K3 sangat diperlukan” dengan bobot 89% artinya kinerja proyek yang dipengaruhi oleh pekerja proyek yang merasa aman jika ada peraturan dan prosedur K3 yang diperlukan dengan jelas dipaparkan . Menurut pendapat beberapa pakar diketahui bahwa kinerja proyek ini dipengaruhi oleh penerapan SMK3

- a. *Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*  
untuk variable penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan dihimbau melalui *safety talk* dan koordinasi melalui kepala per divisi untuk dikomunikasikan dengan anggotanya secara jelas.
- b. *Peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja.*  
Untuk Variable Peraturan dan Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja , tentu menggunakan OHSAS , ISO , dan SMK3 yang berlaku di negara

- c. *Lingkungan kerja*  
Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
- d. *Keterlibatan pekerja*  
Melibatkan para pekerja untuk bisa aktif dalam setiap kegiatan
- e. *Evaluasi Keselamatan dan kesehatan kerja*  
melakukan evaluasi kerja per 3 bulan bersama para HSE dari berbagai cabang. Melihat kurva S yang ada

## KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

1. Nilai bobot rerata 84% maka dapat dikatakan bahwa penerapan system Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek jalan tol cijago seksi 2 B ini telah berjalan Cukup Baik dan Efektif.
2. Namun dalam penelitian ini telah didapat beberapa variable yang mempunyai nilai skor terendah dan dapat mempengaruhi kinerja proyek oleh sebab itu variable tersebut akan diberikan tindakan preventive variable yang termasuk adalah variable yang memiliki bobot < 76% yaitu : X13 dimana adalah variable dengan keterangan ” Perusahaan memaparkan hasil pengukuran kebisingan, getaran, suhu, debu untuk memastikan pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dan benar” oleh sebab itu berdasarkan pendapat pakar perlu adanya tindakan preventive
3. Sedangkan diketahui ada bobot variable yang dapat mempengaruhi kinerja proyek yaitu variable yang mempunyai

bobot paling besar yaitu X17 tentang “Peraturan dan prosedur K3 sangat diperlukan” dengan bobot 89% artinya kinerja proyek dipengaruhi oleh pekerja proyek yang merasa aman jika ada peraturan dan prosedur K3 yang diperlukan dengan jelas dipaparkan dan terbukti dengan peningkatan di kurva S

### Saran

1. Penelitian analisis penerapan system management K3 yang dilakukan hanya terbatas pada pelaksanaan proyek jalan tol Cijago Seksi 2B, sehingga untuk penelitian kedepannya bisa diterapkan di gedung dan jembatan serta bendungan
2. Pelaksanaan SMK3 ini harus lebih diperhatikan guna memperbaiki kinerja proyek

### Daftar Pustaka

- [1] Ali, F. 2008. Tinjauan Penerapan K3 pada Proyek Pembangunan Gedung Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Riau. Skripsi Teknik Sipil. Pekanbaru: Universitas Riau.
- [2] Ariza E.N, Sugiyarto, Fajar Sri H., 2016. Analisis Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Pekerja Konstruksi pada Proyek Pembangunan Fly Over Palur. e.Jurnal Matriks Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- [3] Bambang Endroyo, Tugino., 2009. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Konstruksi. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Perencanaan, Nomor 1 Volume 9-Januari 2007, Hal 21-31. Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Semarang (UNNES).
- [4] Christina, Wieke Yuni, dkk. *Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi*. Jurnal : Teknik Sipil Universitas Brawijaya (Rekayasa Sipil) Volume 6, No. 1 – 2012 ISSN 1978 – 5658
- [5] Endroyo, B. 2006. Peranan Manajemen K3 dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja Konstruksi. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Universitas Negeri Semarang.
- [6] Febyana Pangkey., 2012. Penerapan System Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi di Indonesia. (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr.Ir.Soekarno-Manado). Jurnal Ilmiah Media Engineering , Vol.2, No.2, Juli. Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sam Ratungali.
- [7] Ferry Nurja. 2016. Evaluasi penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek peningkatan kapasitas landasan terbang. Skripsi. Jurusan Teknik Sipil, Sekolah Tinggi Teknik PLN.
- [8] Indria, S. 2009. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai wujud dari kebijakan K3 di PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- [9] Irwin, H. 2012. Tinjauan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pembangunan Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri dan Pembangunan The Peak Hotel and Apartment di Pekanbaru. Skripsi Teknik Sipil. Pekanbaru: Universitas Riau.
- [10] Lestari, T. Erlin Trisyulianti (2010). *Hubungan Keselamatan dan Kesehatan (K3) dengan Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus: Bagian Pengolahan PTPN VIII Gunung Mas, Bogor)*. Jurnal : IPB.

- [11] Nadya Safira.,2014. Analisa faktor yang mempengaruhi pada kinerja proyek pada pembanguna hotel Batiqa Palembang. Skripsi. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan.
- [12] Rukhviyanti, N (2007). *Pengaruh penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja karyawan melalui motivasi pada perusahaan Garmen di kawasan industry Rancaekek. Jurnal. Bandung : STIE Indonesia Mandiri. Tanggal akses : 20 Mei 2010.*
- [13] Suci Restu Miswati Jusun, Hendra Taufik 2016. Tinjauan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja . e.Jurnal Matriks Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Riau , Pekanbaru
- [14] Syahrizal, Rahim Matondang,Chairul Muluk , 2015. Analisis Strategi Penanggulangan Kecelakaan Kerja untuk mencapai tingkat kecelakaan kerja nihil Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara.
- [15] Wieke Yuni Christina, Ludfi Djakfar, Armanu Thoyib 2012PENGARUH BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA PROYEK KONSTRUKSI Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang .



## PENGARUH PENGETAHUAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PERILAKU PEKERJA KONSTRUKSI PADA PROYEK JALAN TOL BOGOR RINGROAD SEKSI IIB

**Dani Hartanto, Ronald Siahaan, Suprpto**

<sup>1</sup>Mahasiswa Progam Pasca Sarjana (S2) Magister Teknik Sipil, Universitas Tama Jagakarsa  
Jl. Letjen TB Simatupang No. 152, Jakarta Selatan 12530  
danierick22@gmail.com

### Abstrak

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Cina, di Indonesia pembangunan jalan tol 1000 km dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun, oleh karena itu pemerintah melakukan upaya percepatan, namun dalam perjalanannya banyak terjadi kecelakaan kerja. Proses pembangunan konstruksi umumnya adalah kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Untuk itu diperlukan pengetahuan K3 terhadap perilaku pekerja agar terciptanya target *zero accident*, terjaminnya kualitas, keamanan dan keselamatan konstruksi dimana proyek jalan tol BORR seksi IIB ini merupakan proyek konstruksi berat dan melayang di atas tanah (*Elevated*). Setiap kecelakaan pasti ada sebab dan akibatnya yang biasanya diawali oleh *unsafe action* atau *unsafe condition*. Oleh karena itu perlu diketahui pengaruh pengetahuan K3 terhadap perilaku pekerja konstruksi dilihat dari beberapa aspek terkait K3 seperti definisi dan inisiasi K3 (X1), Sistem Manajemen K3 (X2), mekanisme alat pelindung diri (X3), sarana dan prasana K3 (X4) dan risiko K3 (X5). Teknik pengambilan sampel dengan metode penelitian kualitatif serta dengan cara *random sampling*. Data penelitian diambil dari jawaban kuisioner yang disebarkan kepada pekerja proyek tol BORR seksi IIB. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan K3 dengan perilaku pekerja. Analisis regresi digunakan untuk menjelaskan pengaruh aspek pengetahuan K3 terhadap perilaku pekerja konstruksi secara bersama-sama dengan analisis regresi linier berganda maupun parsial dengan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian dari kelima variabel bebas ini urutan besarnya pengaruh adalah disebabkan oleh Sistem Manajemen K3 (X<sub>2</sub>) 73,4%, Mekanisme Alat Pelindung Diri (X<sub>3</sub>) 60,9%, Definisi dan Inisiasi K3 (X<sub>1</sub>) 42,6%, Risiko K3 (X<sub>5</sub>) 7,9% dan Sarana dan Prasarana K3 (X<sub>4</sub>) 3,5% sehingga yang perlu ditangani oleh pimpinan proyek adalah berdasarkan urutan persentasi tersebut.

**Kata kunci :** Pengetahuan K3, Perilaku Pekerja, Proyek Jalan Tol

### Abstract

Infrastructure development in Indonesia is still lagging behind neighboring countries such as Malaysia and China, in Indonesia the construction of the 1000 km toll road is achieved within 5 (five) years, therefore the government makes efforts to accelerate, but in the course of accelerating there are many work accidents. construction is generally an activity that contains many elements of hazards. Therefore, it is necessary knowledge of the OSH to worker attitude in order to create zero accident target, quality assurance, safety and safety of construction where BORR section IIB section project is a heavy construction project and floating above ground (*Elevated*). Every accident must have cause and consequence that usually begins by unsafe action or unsafe condition. Therefore, it is important to know the influence of OSH knowledge on the behavior of construction workers as seen from several aspects related to OSH such as definition and initialization of OSH (X1), OSH Management System (X2), mechanism of personal protective equipment (X3), facilities and infrastructure OSH (X4) and risk of OSH (X5). Sampling technique with qualitative research methods and by random sampling. The research data

were taken from the questionnaire answers distributed to the BORR section IIB section of the toll road workers. Correlation analysis is used to know the relation between knowledge of OSH and worker attitude. Regression analysis was used to explain the effect of knowledge aspect of OSH to the attitude of construction workers together with multiple linear regression analysis and partial with simple linear regression analysis. The results of the five independent variables of this order of magnitude of influence are caused by OSH Management System (X2) 73,4%, Self Protective Equipment Mechanism (X3) 60,9%, Definition and Initiation OSH (X1) 42,6%, OSH Risk (X5) 7,9% and OSH Facility and Infrastructure (X4) 3,5% so that which needs to be handled by the project leader is based on the order of the percentage.

**Keywords:** OSH Knowledge, Worker Attitude, Toll Road Project

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal sampai saat ini dibandingkan dengan negara lain, sebagai contoh di China, pembangunan jalan tol bisa sampai ribuan kilometer (km) per tahun. Sementara di Indonesia, pembangunan 1.000 km membutuhkan waktu 5 tahun. Oleh karena itu pemerintah melakukan usaha percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi dalam enam bulan terakhir, mulai dari bulan agustus 2017 sampai dengan bulan februari 2018 telah terjadi sedikitnya 7 (tujuh) kejadian kecelakaan kerja, hal ini menjadi peringatan bagi pihak terkait mengenai aspek keselamatan dan kecelakaan kerja, padahal dalam permen PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen K3 konstruksi telah diatur bahwa setiap proyek yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan akan dikenakan sanksi dari surat peringatan sampai dengan penghentian pekerjaan. Akibat dari adanya kasus kecelakaan yang terjadi pada enam bulan terakhir maka dikeluarkan moratorium/penghentian sementara untuk pekerjaan proyek jalan layang (*elevated*) di seluruh Indonesia baik itu kontraktor asing maupun kontraktor dalam negeri, hal ini berdampak langsung kepada 32 proyek jalan layang dan 4 proyek kereta yang diberhentikan.

Proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Situasi dalam lokasi proyek mencerminkan karakter yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan sulit dilaksanakan sehingga dibutuhkan stamina yang prima dari pelaksananya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan konstruksi ini merupakan penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi. Banyaknya kecelakaan kerja serta

penyakit akibat kerja sangat merugikan banyak pihak terutama tenaga kerja bersangkutan.

Terkait dengan potensi risiko kecelakaan kerja pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, maka pengetahuan akan K3 pada suatu proyek konstruksi saat ini telah menjadi kebutuhan mendasar. Aspek K3 tidak akan bisa berjalan seperti seharusnya tanpa ada intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk mengelolanya (*Safety management*), yang sering disebut dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). K3 konstruksi bukanlah sesuatu yang baru, mengingat ada beberapa regulasi terkait K3 sudah ada sejak tahun 1970, seperti UU Nomor 1 tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja, dan beberapa tahun lalu pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri No.9 tahun 2008 tentang SMK3. Secara umum pengetahuan tentang K3 sangat luas, akan tetapi komponen K3 yang dipandang penting untuk dijadikan tolak ukur pemahaman K3. Komponen – komponen tersebut adalah definisi dan inisiasi K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), Alat Pelindung Diri (APD), Sarana dan prasarana K3, risiko K3.

Bpjs ketenagakerjaan mengatakan berdasarkan data pembayaran klaim Program Kecelakaan Kerja (JKK) terdapat peningkatan jumlah kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2017. Pada tahun 2017, sebanyak 130.926 kasus kecelakaan kerja (meningkat 14,40%), dibandingkan tahun 2016 sebanyak 114.450 kasus dan 25 kasus diantaranya merupakan kasus penyakit akibat kerja. Pentingnya penerapan norma keselamatan, kesehatan kerja (K3) mulai dari tempat kerja, wilayah publik dan komersial untuk menekan angka kecelakaan kerja.

Dalam penulisan ini, penulis mengambil objek penelitian pada proyek Jalan Tol Ringroad Bogor Seksi II B (Ruas Kedung Badak –

Simpang Yasmin) dengan penyedia jasanya adalah PT. Wijaya Karya (persero) Tbk, Pemilik Proyek PT. Marga Sarana Jabar dan Konsultan Supervisi PT. Purnajasa Bimaprata KSO dengan PT. Wira Nusantara Bumi.

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan K3 terhadap perilaku pekerja konstruksi dilihat dari aspek terkait K3 seperti definisi dan inisiasi, sistem manajemen, mekanisme APD, sarana dan prasarana, serta risiko K3.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel pengetahuan K3 terhadap perilaku pekerja konstruksi secara bersama-sama.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel pengetahuan K3 terhadap perilaku pekerja secara parsial.

### Filosofi K3

Salah satu organisasi professional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Amerika Serikat, *International Association of Safety Profesional (IASP)* menetapkan 8 (delapan) prinsip K3 yang menjadi landasan pengembangan K3 (ramli, 2010:23) sebagai berikut :

1. K3 adalah tanggung jawab moral atau etik (*safety is ethical responsibility*).
2. K3 adalah budaya, bukan sekedar program (*Safety is culture, not a program*).
3. K3 adalah tanggung jawab manajemen (*Management is responsible*).
4. Pekerja harus dididik untuk bekerja dengan aman (*Employees must be trained to work safety*).
5. K3 adalah cerminan kondisi ketenagakerjaan (*Safety is a condition of employment*).
6. Semua kecelakaan dapat dicegah (*All injuries are preventable*).
7. Program K3 bersifat spesifik (*Safety programs must be site specific*).
8. K3 baik untuk bisnis (*Safety is good business*).

### Sistem Manajemen K3 (SMK3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnya dalam perusahaan seperti operasi, produksi, logistik, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran. Aspek K3 tidak akan bisa berjalan seperti apa adanya tanpa intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk mengelolanya, karena itu ahli K3 sejak awal tahun 1980an berupaya meyakinkan semua pihak, khususnya manajemen organisasi untuk menempatkan aspek K3 setara dengan unsur lain dalam organisasi

### Pengertian SMK3

SMK3 merupakan konsep pengelolaan K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran dan pengawasan.

### Tujuan SMK3

Berbagai tujuan SMK3 dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi.
- b. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi.
- c. Sebagai dasar penghargaan (*award*).
- d. Sebagai sertifikasi.

### Proses SMK3

SMK3 dimulai dengan penetapan kebijakan K3 oleh manajemen puncak sebagai perwujudan komitmen manajemen dalam mendukung penerapan K3. Kebijakan K3 selanjutnya dikembangkan dalam perencanaan, tanpa perencanaan yang baik, proses K3 akan berjalan tanpa arah (*misguided*), tidak efisien, dan tidak efektif. Berdasarkan hasil perencanaan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penerapan dan operational, melalui pengerahan semua sumber daya yang ada, serta melakukan berbagai program dan langkah pendukung untuk mencapai keberhasilan.. Dengan demikian organisasi dapat segera melakukan perbaikan dan langkah koreksi lainnya.



Gambar 2.1 Siklus manajemen

### Tujuan dan manfaat K3

K3 dianggap sebagai suatu pemborosan, pengeluaran biaya yang sia-sia (ratio penilaian 0,8 – 4,1% menurut data safety and health management system etool oleh OSHA,2007) atau sekedar formalitas yang harus dipenuhi oleh organisasi. K3 masih dianggap sebagai beban tambahan bagi organisasi. penilaian atau persepsi ini sering menghambat pelaksanaan K3. Aspek K3 bersifat multi dimensi, karena itu tujuan dan manfaat K3 juga harus dilihat dari berbagai sisi, seperti dari sisi hukum, perlindungan tenaga kerja, ekonomi, pengendalian kerugian, sosial dan lain sebagainya.

### Kecelakaan dan Keselamatan Kerja

Kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa/luka/cacat maupun pencemaran. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja. Dengan kondisi fisik yang menurun atau menjadi tidak mampu lagi untuk bekerja, penghasilan berkurang atau menjadi tidak ada, oleh sebab itu perlu pemberian kompensasi akibat kecelakaan dan penyakit kerja.

### Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja ini bertujuan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terhindar dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Pengelola tempat kerja wajib mentaati standar kesehatan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah serta menjamin lingkungan kerja yang sehat dan bertanggung jawab atas

terjadinya kecelakaan kerja.

### Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan APD merupakan keharusan dimana biasanya pekerja atau buruh bangunan yang bekerja di sebuah proyek atau pembangunan konstruksi diwajibkan menggunakan APD, hal ini sudah menjadi suatu kesepakatan oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Adapun peralatan sudah semestinya sesuai dengan yang dipersyaratkan dan akan lebih baik jika bisa menunjang kenyamanan kerja serta memberikan proteksi yang handal dari risiko kecelakaan kerja. Namun dalam realisasinya pemakaian APD masih sangat sulit, mengingat para pekerja akan menganggap bahwa alat ini akan mengganggu pekerjaan. APD bukanlah alat perlindungan yang nyaman apabila dikenakan tetapi fungsi dari alat ini sangatlah besar sebab dapat mencegah penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan pada waktu kerja. Berdasarkan pasal 14 huruf c UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pengusaha wajib menyediakan APD secara Cuma – Cuma terhadap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja.

### Manajemen Proyek Konstruksi

Proyek didefinisikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas unik yang saling terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu dan dilakukan dalam periode waktu tertentu pula. Menurut PMBOK *Guide* (2004), sebuah proyek memiliki beberapa karakteristik penting yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. *Temporary*
2. *Unique*
3. *Progressive Elaboration*

Karakteristik –karakteristik di atas tersebut yang membedakan aktivitas suatu proyek terhadap aktivitas rutin operasional. Aktivitas operasional cenderung bersifat terus menerus dan berulang – ulang, sementara aktivitas proyek bersifat temporer dan unik, kemudian dari segi tujuannya aktivitas akan berhenti ketika tujuan telah tercapai, sementara aktivitas operasional akan terus menyesuaikan tujuannya agar pekerjaan tetap berjalan.

### Ukuran Proyek

Proyek dapat dilihat dari sumber daya yang diperlukan, biayanya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Hal – hal ini digunakan sebagai kriteria ukuran proyek, sehingga ukuran proyek dapat dilihat dari jumlah kegiatannya, besar biayanya, jumlah tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan, sedangkan tingkat kompleksitasnya suatu proyek ditandai dengan jumlah kegiatan dan hubungan antar kegiatan, jenis dan jumlah hubungan antar kelompok di dalam organisasi dan pihak luar, serta tingkat kesulitannya. Suatu proyek dapat berukuran besar dengan jumlah kegiatan yang banyak, tenaga kerja yang besar namun tingkat kesulitannya sedang.

### Manajemen Risiko K3

Tujuan upaya K3 adalah untuk mencegah kecelakaan yang ditimbulkan karena adanya suatu bahaya di lingkungan kerja, karena itu pengembangan SMK3 harus berbasis pengendalian risiko sesuai dengan sifat dan kondisi bahaya yang ada. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa K3 tidak diperlukan jika tidak sumber bahaya yang harus dikelola.

### Konsep Perilaku

Perilaku secara umum menempatkan sasaran sebagai orientasi. Motivasi utama dari perilaku atau tindakan kita adalah adanya kehendak dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Individu tersebut tidak selalu menyadari apa yang menjadi tujuan atau motivasi tersebut secara spesifik. Sebenarnya semua perilaku merupakan suatu seri aktivitas. Untuk mengubah budaya K3 dapat dilakukan dengan mengubah *mindset* atau cara pandang para pekerja.

### Hubungan Perilaku K3 dengan budaya K3

Untuk mengubah budaya K3 dapat dilakukan dengan mengubah cara pandang para pekerja. Perubahan cara pandang dapat dilakukan dari mengubah perilaku. Kemudian apa keterkaitan antara cara pandang (*Mindset*) dengan perilaku. Perilaku adalah tindakan yang dapat diamati atau dilihat, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dilihat, dirasa dan didengar, oleh karena itu perilaku dapat diukur sehingga dapat dikelola dan ditingkatkan. Sistem manajemen secara menyeluruh akan mempengaruhi perilaku para pekerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku yang memberi

dampak kerugian adalah perilaku yang tidak disadari dan terjadinya dalam waktu yang sangat cepat.

Manajemen risiko K3 juga merupakan acuan sebagai dasar dalam menyusun program kerja K3 dan pengendalian program inspeksi, program pelatihan, program sosialisasi K3 dan program – program kerja k3 lainnya. Dengan mengetahui titik –titik rawan kecelakaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka inspeksi bisa dibuat jadwal yang terencana dengan baik untuk memonitor persiapan pelaksanaan apakah sudah cukup baik untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

### Metode yang digunakan

Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu metode mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta menyajikan dan menganalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Metode bisa bermakna apabila data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, dan kredibel sehingga tujuan penelitian tercapai. Metode ini tepat digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, perusahaan sebagai objek penelitian yang bertujuan membuat deskriptif gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Made Bayu Sambira Teja pada tahun 2015 dengan judul tesis Pengaruh Pengetahuan K3 terhadap perilaku pekerja konstruksi pada tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa, Bali. Menunjukkan hasil penelitian yang didapat bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang positif dan rendah antara pengetahuan K3 dengan perilaku pekerja. Dari aspek- aspek pengetahuan K3, maka aspek mekanisme penggunaan alat pelindung diri dan pemanfaatan sarana prasarana di tempat kerja berpengaruh secara positif/berbanding lurus dan tidak signifikan, sedangkan aspek pemahaman akan definisi dan inisiasi, pemahaman sistem manajemen K3 dan pemahaman akan risiko berpengaruh secara negatif/berbanding terbalik dan tidak signifikan terhadap penerapan pekerja

konstruksi dalam berperilaku aman dan selamat.

Menurut (Krisyanto Rachmat 2006) riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam – dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada pendalaman data yang didapat oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

Dalam penelitian kualitatif peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum dan pewawancara atau moderator group periset menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam group.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Proyek Pembangunan Jalan Tol Ringroad Bogor Seksi IIB (Ruas Kedung Badak – Simpang Yasmin), Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

### Penentuan Sumber Data

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Random Sampling* atau pengambilan sampel secara acak.

Teknik penyebaran kuisioner dengan cara meminta bantuan staf PT. Wijaya Karya yang terlibat dalam proyek Pembangunan Jalan Tol Ringroad Bogor Seksi IIB (Ruas Kedung Badak – Simpang Yasmin) untuk menyebarkan kuisioner dan membagikan langsung pada pekerja konstruksi pada proyek tersebut yang siap bekerja sama dan dijadikan sumber data.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah semua pekerja atau orang yang terlibat dalam

pengerjaan proyek Pembangunan Jalan Tol Ringroad Bogor Seksi II B (Ruas Kedung Badak – Simpang Yasmin). Dalam hal ini yang dianggap sebagai populasi adalah sebatas karyawan tetap, karyawan kontrak proyek dan karyawan lepas yang semuanya berjumlah 85 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

karakteristik pekerja berdasarkan status kerja

No.	Sifat Kontrak Kerja	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Karyawan Tetap	20	23,529
2	Karyawan Kontrak Proyek	26	30,588
3	Karyawan Lepas	39	45,883
		85	100

Sumber : tabulasi hasil survei

### Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sampel harus mewakili populasi, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan random sampling dari populasi yang ada. Jumlah sampel yang diambil dari populasi yang ada menurut rumus Slovin mengikuti formula matematik sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel, dihitung dari rumus

N = jumlah populasi, 85 orang

e = kesalahan pengambilan sampel (%) yang dapat ditoleransi terhadap ketidaktepatan penggunaan sampel sebagai pengganti populasi= 10%

$$n = \frac{85}{1 + 85(0,1)^2} = 46$$

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut, karena populasi besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti itu dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik sampel diambil dengan cara *random sampling* yang terdiri dari pekerja sebanyak 46 orang.

### Jenis Data

Untuk mendapatkan tujuan akhir dari penelitian, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari responden dengan mendistribusikan kuisioner dan atau wawancara langsung kepada pekerja konstruksi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari unit SMK3L PT. Wijaya Karya seperti data umum proyek, RK3K proyek, data jumlah pekerja, serta literatur – literatur dan media yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

### Korelasi Pengetahuan K3 dengan Perilaku Pekerja Konstruksi

Korelasi karakteristik pengetahuan K3 dengan perilaku pekerja pada tempat kerja merupakan korelasi dua variabel yang berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga korelasi antara dua variabel tersebut dapat diketahui dimana dalam penelitian ini dikerjakan dengan metode Analisis regresi dengan bantuan program SPSS dan *Microsoft Excel*.

### Uji Validitas

Pengujian validitas adalah untuk mengetahui derajat ketepatan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua pernyataan (instrumen) penelitian yang diajukan untuk mengukur variabel penelitian adalah valid.

Untuk Pengujian validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) dengan ketentuan jika  $r$  hitung positif, serta  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka butir atau variabel tersebut valid. Jika  $r$  hitung

negatif serta  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Tabel 2.2 Interpretasi koefisien korelasi  
Nilai r

Interpretasi Koefisien	Tingkat Hubungan
0.8 - 1.000	Sangat Kuat
0.6 - 0.7990	Kuat
0.4 - 0.5990	Cukup Kuat
0.2 - 0.3990	Rendah
0 - 0.1990	Sangat Rendah

Sumber: Ridwan 2006

### Uji Realibilitas

Uji Realibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi atau kestabilan alat ukur, apakah alat yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam uji realibilitas ini digunakan program SPSS dengan metode *Cronbach's alpha*

Untuk pengujian realibilitas atas instrumen yang sama digunakan formula *Cronbach's alpha*. Formula ini digunakan untuk melihat sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama pada saat yang berbeda. Jadi pengukuran realibilitas berkenaan dengan konsistensi dan keakuratan pengukuran.

$$r_{11} = \left( \frac{n}{n-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_t^2}{\sigma_x^2} \right)$$

### Definisi Operasional

Menurut Nasir (2009), definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau spesifikasi kegiatan atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Dalam penelitian ini sebagai variabel bebas adalah pengetahuan tentang K3 yang terdiri dari:

- Definisi atau inisiasi K3 (X1).
- Sistem Manajemen K3 (X2).

- c. Mekanisme Alat Pelindung Diri (X3).
- d. Sarana dan Prasarana K3(X4).
- e. Risiko K3 (X5).

Variabel Terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Pekerja Konstruksi.

### Skala Pengukuran

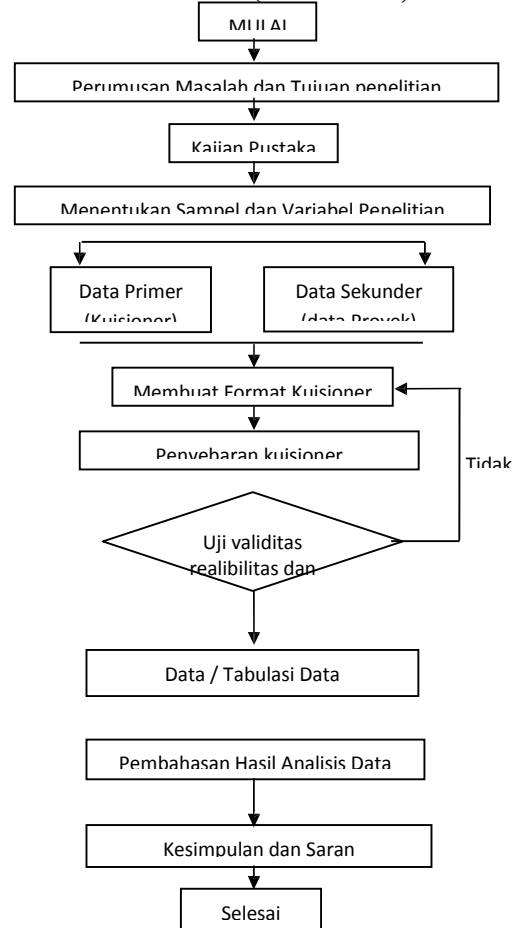
Semua variabel yang digunakan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *Skala Likert*. Dalam hal ini penulis berasumsi bahwa *skala likert* menghasilkan pengukuran variabel dalam skala interval. Ada lima alternatif pengukuran yang digunakan yaitu 5 titik pilihan pada setiap butir pertanyaannya, yaitu :

- 5 = Sangat Tahu/Sangat Penting/Sangat Sering/Sangat Besar
- 4 = Tahu/Penting/Sering/Besar
- 3 = Kurang Tahu/Kurang Penting/Kadangkadangkang/Sedang
- 2 = Tidak Tahu/Tidak Penting/Jarang/Kecil
- 1 = Sangat Tidak Tahu/Sangat Tidak Penting/Tidak Pernah/ Sangat Kecil

### Cara Penyajian Data

Cara penyajian data yang komunikatif akan dapat mudah untuk dipahami, sehingga diperlukan cara – cara tertentu untuk menyampaikan data tersebut, seperti penyajian data berupa tabel dan grafik. Di samping itu, hasil pengumpulan data juga dapat dibuat secara naratif, berupa deskripsi data yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

### Alur Penelitian (Flow Chart)



### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan analisis dan pengujian statistik dengan menggunakan *software* SPSS versi 22,00 terhadap pengaruh variabel bebas Definisi dan Inisiasi K3, Sistem Manajemen K3, Mekanisme Alat Pelindung Diri, Sarana dan Prasarana K3, dan Risiko K3 secara bersama-sama terhadap Perilaku Pekerja Konstruksi seperti apa yang diuraikan dalam hipotesis. Lebih jauh secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Variabel bebas Definisi dan Inisiasi K3, Sistem Manajemen K3, Mekanisme Alat Pelindung Diri, Sarana dan Prasarana K3, dan Risiko K3 secara bersama-sama terhadap Perilaku Pekerja Konstruksi dengan keabsahan 99%. Presentasi pengaruh adalah sebesar 85,8%. Sisanya 14,2% disebabkan oleh pengaruh lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nilai pengaruh secara bersama-sama ini lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh secara



terpisah yaitu pengaruh Definisi dan Inisiasi K3, Sistem Manajemen K3, Mekanisme Alat Pelindung Diri, Sarana dan Prasarana K3, dan Risiko K3 secara terpisah. Persamaan regresi adalah :  $Y = -15.066 + 0,100 X_1 + 0,445 X_2 + 0,544 X_3 + 0,148 X_4 + 0,113 X_5$  persamaan ini signifikan karena  $F_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  ( $55,238 > 3,51$ ).

2. Variabel bebas Definisi dan Inisiasi K3 ( $X_1$ ), berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Perilaku Pekerja Konstruksi dengan keabsahan 99% Persentasi pengaruh adalah sebesar 42,6%. persamaan regresi  $Y = 24,382 + 0,631 X_1$ . Persamaan regresi ini signifikan karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5.717 > 2,414$ ),
3. Variabel bebas Sistem Manajemen K3 ( $X_2$ ), berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Perilaku Pekerja Konstruksi dengan keabsahan 99% Persentasi pengaruh adalah sebesar 73,4%. persamaan regresi  $Y = 14,376 + 0,764 X_2$ . Persamaan regresi ini signifikan karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $11.025 > 2,414$ ).
4. Variabel bebas Mekanisme Alat Pelindung Diri ( $X_3$ ), berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Perilaku Pekerja Konstruksi dengan keabsahan 99% Persentasi pengaruh adalah sebesar 60,9%. Persamaan regresi  $Y = 10,237 + 0,885 X_3$ . Persamaan regresi ini signifikan karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $8.277 > 2,414$ )
5. Variabel bebas Sarana dan Prasarana K3, berpengaruh negatif terhadap variabel terikat Perilaku Pekerja Konstruksi persamaan regresi  $Y = 63,880 - 0,170 X_4$ .
6. Variabel bebas Risiko K3 ( $X_5$ ), berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Perilaku Pekerja Konstruksi dengan keabsahan 99% Persentasi pengaruh adalah sebesar 7,9%. persamaan regresi  $Y = 40,534 + 0,260 X_5$ . Persamaan regresi ini signifikan karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.938 > 2,414$ ).

### Kesimpulan

1. Perilaku Pekerja Konstruksi dipengaruhi oleh 5(lima) variabel bebas Definisi dan Inisiasi K3, Sistem Manajemen K3, Mekanisme Alat Pelindung Diri, Sarana dan Prasarana K3, dan Risiko K3. Dari kelima variabel bebas ini urutan besarnya pengaruh adalah disebabkan oleh Sistem Manajemen K3 ( $X_2$ ), Mekanisme Alat Pelindung Diri ( $X_3$ ), Definisi dan Inisiasi

K3 ( $X_1$ ), Risiko K3 ( $X_5$ ) dan Sarana dan Prasarana K3 ( $X_4$ ). Masing-masing pengaruh dalam persen adalah 73,4%, 60,9% , 42,6%, 7,9%. dan 3,5%.

2. Jika kelima pengaruh variabel bebas Sistem Manajemen K3 ( $X_2$ ), Mekanisme Alat Pelindung Diri ( $X_3$ ), Definisi dan Inisiasi K3 ( $X_1$ ), Risiko K3 ( $X_5$ ) dan Sarana dan Prasarana K3 ( $X_4$ ) diperhatikan secara bersama-sama menghasilkan pengaruh yang lebih besar yaitu 85,8%. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa kelima pengaruh saling mendukung sehingga menghasilkan pengaruh bersama-sama yang lebih besar dan pengaruh secara parsial.

### Saran-saran

Kepada Pengelola proyek disarankan bahwa :

1. Perilaku Pekerja Konstruksi dipengaruhi oleh 5(lima) variabel bebas Definisi dan Inisiasi K3, Sistem Manajemen K3, Mekanisme Alat Pelindung Diri, Sarana dan Prasarana K3, dan Risiko K3. Dari kelima variabel bebas ini urutan besarnya pengaruh adalah disebabkan oleh Sistem Manajemen K3 ( $X_2$ ), Mekanisme Alat Pelindung Diri ( $X_3$ ), Definisi dan Inisiasi K3 ( $X_1$ ), Risiko K3 ( $X_5$ ) dan Sarana dan Prasarana K3 ( $X_4$ ). Masing-masing pengaruh dalam persen adalah 73,4%, 60,9% , 42,6%, 7,9%. dan 3,5%, sehingga yang perlu ditangani oleh pimpinan adalah berdasarkan urutan persentasi tersebut.
2. Jika kelima pengaruh variabel bebas Sistem Manajemen K3 ( $X_2$ ), Mekanisme Alat Pelindung Diri ( $X_3$ ), Definisi dan Inisiasi K3 ( $X_1$ ), Risiko K3 ( $X_5$ ) dan Sarana dan Prasarana K3 ( $X_4$ ) diperhatikan secara bersama-sama menghasilkan pengaruh yang lebih besar yaitu 85,8%. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa kelima pengaruh saling mendukung sehingga menghasilkan pengaruh bersama-sama yang lebih besar dan pengaruh secara parsial.
3. Hasil Penelitian ini hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan konstruksi dalam melakukan pengembangan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan maupun di proyek.
4. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya ruang lingkup penelitian dapat dikembangkan lagi antara lain dengan mencoba melihat hubungan antara produktivitas dan sumber daya dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau

pengaruh besaran biaya K3 terhadap tingkat kecelakaan kerja.

5. Untuk menjamin kualitas, keamanan dan keselamatan konstruksi harus ditekankan mengenai kedisiplinan dalam pengawasan, serta memperketat pengawasan.

### Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja konstruksi pada proyek jalan Tol Bogor Ringroad seksi IIB, maka penulis memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan mengenai Kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan pada proyek konstruksi antara lain :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur bukanlah dasar untuk membenaran atau alasan untuk memaklumi adanya kecelakaan kerja karena percepatan adalah upaya untuk pencapaian target.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi agar lebih ditekankan dari berbagai aspek terutama aspek K3 oleh pelaksana pekerja konstruksi.
3. Peran konsultan pengawas sebaiknya dimaksimalkan, seharusnya konsultan lebih cerdas dan lebih tegas dalam menggunakan wewenangnya agar pelaksanaan sesuai dengan standar operasi prosedur dan sesuai spesifikasi material yang telah ditentukan.
4. Negara harus membuat standar operasi prosedur dalam bidang konstruksi atau pembangunan infrastruktur melalui kementerian pekerjaan umum sehingga kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi kembali.
5. Untuk para kontraktor pelaksana proyek konstruksi agar menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah tertuang dalam peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2015 agar target Zero Accident dilingkungan kegiatan proyek konstruksi dapat tercapai.
6. Peran pengawas keselamatan dan kesehatan kerja perlu ditingkatkan untuk memantau pelaksanaan program K3 serta mengawasi perilaku pekerja yang dapat menimbulkan kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Dengan adanya

pengawasan yang intensif diharapkan pekerja dapat bekerja sesuai dengan prosedur kerja aman dan sehat.

7. Hasil Penelitian ini hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan konstruksi dalam melakukan pengembangan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan maupun di proyek.
8. Agar regulasi mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diterapkan dengan baik dilapangan sebaiknya dimasukkan kedalam pasal kontrak kerja dan memuat mengenai sanksi – sanksi mengenai pelanggaran.
9. Untuk menjamin kualitas, keamanan dan keselamatan konstruksi harus ditekankan mengenai kedisiplinan dalam pengawasan, serta memperketat pengawasan.
10. Untuk meningkatkan penerapan K3 dengan meningkatkan fungsi pengawasan karena selama ini pengawasan baru dilakukan setelah adanya kejadian dan dapat mempublikasikan kepada masyarakat luas mengenai hasil dari investigasi dan evaluasi kecelakaan untuk pembelajaran dari kejadian tersebut.
11. Untuk pemerintah melalui Kemenakertrans dan Komisi IX DPR RI sudah saatnya membuat peraturan mengenai K3L yang mengatur mengenai perlindungan masyarakat luas (*Public safety*) dengan melakukan perubahan atau revisi UU No.1 tahun 1970.
12. Pada saat ini anggaran K3 hanya dimasukan kedalam item pembayaran pekerjaan mobilisasi dan secara teoritis dalam pelaksanaan proyek terdapat berbagai item pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga agar lebih tepat, biaya K3 dimasukan kedalam analisa harga satuan pekerjaan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 09/PER/M/2008 Pasal 9 Bab IV mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang.
13. Perlu diadakan pelatihan Keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerja proyek baik itu pekerja dari main

kontraktor dan sub kontraktor sehingga target *zero accident* dapat tercapai.

14. Perlu dibuat adanya sanksi dan *reward* terhadap para pekerja di proyek dalam menjalankan program K3 sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) Third Edition, Project Management Institute.* 2004.
- Anonim.1970. Undang-Undang Tentang Keselamatan Kerja. UU No. 1 Tahun 1970, LN No. 1 Tahun 1970, TLN No.2918.
- Anonim, 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonim, 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonim, 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonim,2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
- Bayu Sambira Teja, Made. 2015. Pengaruh Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Perilaku Pekerja Konstruksi Pada Proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. Denpasar: Universitas Udayana.
- Bird, Jr., E, Frank dan Germain L. George. 1992. *Practical Loss Control Leadership.* Atalanta: *International Loss Control Institute, Inc.*
- BPJS . (2017). Info BPJS Kesehatan.
- Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta. 2005.
- Eka Novianto, Ariza. 2016. Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Pekerja Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Fly Over Palur. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ervianto , 2005, Manajemen Proyek Konstruksi, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Fajar Pebrianto 22 Februari, 2018. Banyak Kecelakaan Kerja, ini pengakuan dan argument Waskita Karya . Tempo, , hlm 1 & 2.
- Feby Novalius 22 Februari, 2018. Moratorium Pembangunan Insfrastruktur *Elevated.* Okezone, , hlm 1 s/d 3.
- HW. Heinrich, Dan Peterson, Nestor Roos, (1980). *Industrial Accident Prevention, New York: Mc. Grow-Hill Book Company* ILO, 1989. Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : PT. Kencana Perdana.
- Millet, John D. (1954). *Management in the public service: The quest for effective performance.* New York: *McGraw-Hill.*
- Nyoman, I. 2017. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Peningkatan Struktur Jalan. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Nasir, Moh. (2009) Metode Penelitian. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Oey Liang Lee. 2010. Pengantar Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama Yudi, Teuku Budi Aulia,Nurisra. 2014. Identifikasi faktor – faktor Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Yang Mempengaruhi Proyek Konstruksi. Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Ramli, Soehatman. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta : Dian Rakyat, 2010.
- Santoso, Budi.2009.”Manajemen Proyek”. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. Bandung: Aflabeta
- Winardi, J. 2004. Motivasi & Pemotivasian Dalam Manajemen. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada.



## IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN NASIONAL BLANGKEJEREN – LAWEAUNAN SECARA SWAKELOLA

Muhammad Iqbal<sup>a,\*</sup>, Muhammad Isya<sup>b</sup>, Hafnidar A. Rani<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

<sup>b</sup>Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

<sup>c</sup>Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, Banda Aceh

\*Corresponding author, email address: [iqbal81.im@gmail.com](mailto:iqbal81.im@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Received 14 March 2018

Received in revised form 12 May 2018

Accepted 21 May 2018

#### Keywords:

Routine maintenance, self-managed, Occupational Safety and Health Management System, OSH risk level

### ABSTRACT

Routine maintenance on the Blangkejeren - Laweunan road is done by self-managed and continuously every year with road length 65 Km. The committing officer undertakes work with the subcontractor who is deemed capable of carrying out the work and provides wages to the foreman who is a resident. To avoid risks, the Committing Officer undertakes the implementation of the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS). Therefore, this study aims to identify the level of OSH risk in routine road maintenance work, identify the level of compliance of subcontractors and workforce employees in OSH implementation on routine maintenance work, and identify the selection of service providers in each routine road maintenance work. The identification of OSH risk level is made based on the Minister of Public Works Regulation no. 05/PRT/M/2014 criteria, and data collected by interviewing the owner's personal. Identification of labor compliance rates of subcontractors and foremen is based on Construction and Building Guidelines No. 004/BM/2006, judged from the use of Personal Protective Equipment (PPE). The analysis method used in this study is descriptive analysis. The result from the analysis indicates that the level of OSH risk in routine national road maintenance work for the routine maintenance of pavement, routine road shoulder maintenance, and routine maintenance of road equipment has a low risk. Whereas in routine maintenance work of sewer, drainage, trenching and heap have a medium risk. Labor compliance from subcontractors has shown a higher percentage about 59% compared to 40% for labor compliance from the foreman. It means that most of the subcontracted workforce is compliant, and almost half the workforce of the foremen adheres to the use of PPE. The routine maintenance work of sewer, drainage, trenching and heap, the right service.

©2018 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN

Jalan nasional merupakan urat nadi perekonomian yang perlu selalu dilakukan pemeliharaan, sehingga umur layan dan kenyamanannya dapat terjaga. Salah satu upaya untuk meningkatkan umur layan dan kenyamanan, adalah dengan cara melakukan pemeliharaan rutin. Pekerjaan pemeliharaan jalan memiliki sifat yang khas, antara lain tempat kerjanya di ruang terbuka yang dipengaruhi cuaca, waktu yang terbatas, menggunakan pekerja yang belum terlatih, banyak mengeluarkan tenaga, dan menggunakan peralatan kerja

yang membahayakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan pada tenaga kerja, Permen PU No: 05/PRT/M/2014 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), menyatakan bahwa konstruksi pada bidang pekerjaan umum Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) harus menerapkan SMK3 pada pekerjaan tersebut. SMK3 pada bidang Pekerjaan Umum (PU) meliputi kebijakan K3, perencanaan K3, pengendalian operasional, pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dan tinjauan ulang kinerja K3.

Pemeliharaan rutin pada ruas jalan Blangkejeren - Laweaunan dilakukan secara kontinyu setiap tahun. Pemeliharaan ini dilaksanakan secara swakelola oleh PPK 08, yang berada di bawah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Aceh, dengan panjang ruas jalan 65 Km. Ruas ini merupakan satu-satunya ruas jalan yang menghubungkan Kota Blangkejeren menuju Aceh Tenggara. Aceh Tenggara merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang harus selalu di jaga, dan dirawat untuk meningkatkan perekonomian daerah setempat khususnya dan Aceh secara umum. Dalam pelaksanaannya, PPK melaksanakan pekerjaan dengan pihak subkontraktor yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, dan memberikan upah kerja kepada mandor yang merupakan penduduk setempat.

Heinrich (1980) dalam teori kecelakaan kerja menyebutkan bahwa salah satu penyebab dasar dari kecelakaan adalah tingkat kepatuhan pekerja. Pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh penyedia jasa tersebut, pada beberapa pekerjaan masih terlihat ketidak seragaman dalam pemenuhan standar K3. Hal ini terlihat dari penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh pekerja yang tidak merata atau ketidakpatuhan pekerja, sehingga membahayakan bagi pekerja dan pengguna jalan itu sendiri. Untuk mengidentifikasi fenomena tersebut, maka perlu dilakukan penelitian “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional secara Swakelola (Studi Kasus: Ruas Jalan Blangkejeren - Laweaunan)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi penerapan K3 untuk pekerjaan pemeliharaan rutin secara swakelola yang memenuhi kriteria, ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat risiko K3 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional secara swakelola di ruas jalan Blangkejeren – Laweaunan, bagaimana tingkat kepatuhan tenaga kerja dari subkontraktor dan mandor dalam penerapan K3 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, dan bagaimana metode pemilihan penyedia jasa pada masing-masing pekerjaan pemeliharaan rutin jalan berdasarkan tingkat kepatuhan tenaga kerja terhadap tingkat risiko K3.

## **1. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Pemeliharaan Rutin**

Permen PU No. 13/PRT/M/2011 menyatakan bahwa pemeliharaan rutin jalan adalah pekerjaan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti standar tertentu.

### **2.2 Swakelola**

Perpres R.I No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa swakelola adalah swakelola merupakan pekerjaan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

### **2.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut Kepmenaker R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 merupakan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat

digunakan secara aman dan efisien. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah dua hal yang sangat penting. Oleh karenanya, semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan/perengkapan perlindungan diri atau *personal protective equipment* (Ervianto, 2005).

## 2.4 Risiko K3

Permen PU No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, menyebutkan bahwa risiko K3 konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi. Penilaian tingkat risiko K3 konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang ditimbulkannya.

## 2.5 Kepatuhan K3

Kepatuhan merupakan sikap seseorang untuk bersedia mentaati dan mengikuti spesifikasi, standar atau aturan yang telah diatur dengan jelas, dimana aturan tersebut diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan dan lembaga lain yang berwenang (Wardani, 2009). Salah satu komponen dari perilaku keselamatan adalah kepatuhan keselamatan, yaitu aktivitas yang harus dilakukan seseorang untuk menjaga keselamatan dalam tempat kerja. Perilaku ini mengikuti pada prosedur standar kerja dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Pekerja mempunyai dua pilihan dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat yaitu dengan patuh dengan kebijakan K3 atau mencegah masalah kecelakaan dan penyakit akibat hubungan kerja (Griffin dan Neal, 2004). Penggunaan APD yang memadai dan tepat saat bekerja menjadi upaya terakhir untuk mengurangi penurunan risiko di area kerja, sekaligus mencegah kecelakaan dan penyakit karena pekerjaan (Rani dan Gunawan, 2017).

## 2. METODE PENELITIAN

### 3.1 Menentukan Populasi dan Sampel

Populasi dimaksudkan kepada tenaga kerja yang berasal dari subkontraktor dan mandor. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2017, jumlah tenaga kerja dari beberapa subkontraktor diperoleh sebanyak 344 orang, dan tenaga kerja dari mandor diperoleh sebanyak 39 orang. Adapun perhitungan sampel tenaga kerja berdasarkan sumbernya, dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Perhitungan sampel tenaga kerja dari subkontraktor

Sehubungan dengan populasi tenaga kerja dari subkontraktor  $> 100$ , maka pengambilan sampel digunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)} = \frac{344}{1 + (344 \times 0,1^2)} = 77,48 \approx 77 \quad (1)$$

Tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 90% dan tingkat kesalahannya adalah 10%. Nilai tingkat kesalahan ini tergantung pada tingkat kepercayaan yang dikehendaki oleh peneliti. Dengan demikian jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 77 tenaga kerja.

#### 2. Perhitungan sampel tenaga kerja dari mandor

Sehubungan dengan jumlah tenaga kerja dari mandor sebanyak 39 orang dan  $< 100$ , maka penelitian ini menggunakan penelitian populasi, tanpa adanya penarikan sampel.

### 3.2 Penyusunan Kuesioner

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner tertutup, jadi di sini responden hanya memilih dari jawaban-jawaban yang telah disediakan. Kuesioner penelitian terbagi atas dua bagian, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kuesioner bagian A, kuesioner ini merupakan karakteristik responden, yang menanyakan tentang jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir. Pengukuran jawaban sesuai dengan karakteristiknya.
2. Kuesioner bagian B, kuesioner ini merupakan tingkat kepatuhan tenaga kerja dalam penerapan K3 pada pemeliharaan rutin jalan nasional secara swakelola di ruas jalan Blangkejeren - Laweunan. Tingkat kepatuhan ini dinilai untuk tenaga kerja dari subkontraktor dan mandor. Pengukuran jawaban dengan menggunakan skala *Guttman*, dimana setiap jawaban dari pihak responden dapat diungkapkan dengan penilaian, seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1**

Kategori jawaban tingkat kepatuhan tenaga kerja

No.	Kualifikasi Jawaban	Skor
1	Pakai (P)	1
2	Tidak Pakai (TP)	5

### 3.3 Penyebaran Kuesioner

Setelah kuesioner selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh persepsi responden mengenai tingkat kepatuhan tenaga kerja dalam penggunaan APD. Langkah-langkah dalam melakukan penyebaran kuesioner dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Menyiapkan kuesioner untuk ditujukan kepada responden;
2. Menginventarisir jumlah tenaga kerja yang akan menjadi responden;
3. Mencari informasi mengenai waktu yang tepat untuk penyebaran kuesioner; dan
4. Menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner penelitian sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan.

### 3.4 Analisa Risiko K3

Analisis risiko K3 ini digunakan untuk mengetahui tingkat risiko K3 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional secara swakelola berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2014. Penilaian tingkat risiko K3 konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan (frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3) dengan dampak keparahan. Dalam hal ini, penentuan nilai kekerapan berdasarkan jumlah frekuensi kejadiannya dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2**

Nilai dan frekuensi kejadian terjadinya risiko K3

No.	Nilai	Frekuensi Kejadian	Kekerapan
1	1 (Satu)	0-1 kali dalam setahun	Jarang terjadi dalam pekerjaan konstruksi
2	2 (Dua)	2 kali dalam setahun	Kadang-kadang terjadi dalam pekerjaan konstruksi
3	3 (Tiga)	≥ 3 kali dalam setahun	Sering terjadi dalam pekerjaan konstruksi

Tingkat kekerapan dan keparahan pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional, dapat diketahui dengan mewawancarai 6 personil *owner*. Adapun narasumber tersebut, dapat diuraikan pada Tabel 3.

**Tabel 3**

Narasumber

No.	Narasumber	Jumlah
1	Koordinator Pemeliharaan Rutin	1 Orang
2	Pelaksana Pemeliharaan Rutin	1 Orang
3	Pengawas Pemeliharaan Rutin	4 Orang
Jumlah narasumber		6 Orang

Hasil wawancara mengenai tingkat kekerapan dan keparahan dari 6 personil *owner* tersebut dilakukan perhitungan rata-rata. Selanjutnya tingkat risiko K3 dapat diketahui dengan cara kekerapan dikalikan dengan keparahan. Penilaian dari tingkat risiko K3 ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu rendah,

sedang, dan tinggi.

### 3.5 Analisa Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik responden, dan frekuensi pengukuran jawaban pada kuesioner dalam menuturkan pemecahan masalah. Permasalahan pertama adalah mengenai tingkat kepatuhan tenaga kerja dari subkontraktor dan mandor, dalam penerapan K3 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional secara swakelola, di ruas jalan Blangkejeren - Laweaunan. Permasalahan kedua adalah pemilihan metode penyedia jasa pada masing-masing item pekerjaan, yang sesuai dengan tingkat kepatuhan penyedia jasa tersebut dalam penerapan K3.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Tingkat Risiko K3 pada Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional

Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional pada ruas jalan Blangkejeren - Laweaunan dilakukan setiap tahun, secara swakelola. Pekerjaan pemeliharaan ini dilaksanakan oleh PPK 08 yang berada di bawah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Aceh, dengan panjang ruas 65 Km. Ruas jalan tersebut menghubungkan Kota Blangkejeren menuju Kabupaten Aceh Tenggara. Pemeliharaan rutin jalan nasional terbagi atas 4 pekerjaan, diantaranya adalah pemeliharaan rutin perkerasan, pemeliharaan rutin bahu jalan, pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan, dan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan. Setiap pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional sepanjang 65 Km, mempunyai tingkat risiko K3 tersendiri.

Risiko K3 merupakan suatu kondisi pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional, yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu, yang jika terjadi akan menimbulkan dampak negatif bagi orang, harta benda, lingkungan, dan keselamatan umum. Berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2014, tingkat risiko K3 ini digolongkan menjadi 3 macam yakni rendah, sedang dan tinggi. Penilaian Tingkat Risiko (TK) K3 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, diketahui dengan mengalikan Kecepatan (K) dengan Akibat (A) pada orang, harta benda, lingkungan, dan keselamatan umum. Kecepatan merupakan jumlah kejadian yang menimbulkan dampak negatif, sedangkan akibat adalah bentuk dampak negatif yang timbul dari kejadian tersebut seperti ringan, sedang dan berat. Kecepatan dapat diketahui melalui wawancara dengan personil *owner*, sedangkan akibat dapat diketahui melalui observasi. Penilaian tingkat risiko K3 pada pemeliharaan rutin jalan nasional dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.**

Penilaian tingkat risiko K3 pada pemeliharaan rutin jalan nasional

No.	Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional	Mean Total TK K3	Tingkat Risiko
1	Pemeliharaan rutin perkerasan	2	Rendah
2	Pemeliharaan rutin bahu jalan	2	Rendah
3	Pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan	3	Sedang
4	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	2	Rendah

Hasil identifikasi risiko K3 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional di ruas jalan Blangkejeren - Laweaunan terdapat 2 tingkatan yakni risiko rendah dan sedang. Dalam hal ini yang risiko rendah terdapat pada pekerjaan pemeliharaan rutin perkerasan, pemeliharaan rutin bahu jalan, dan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan. Risiko sedang terdapat pada pekerjaan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan.

### 4.2 Tingkat Kepatuhan Tenaga Kerja dari Subkontraktor dan Mandor

Dalam pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan nasional di ruas jalan Blangkejeren - Laweaunan, PPK melaksanakan pekerjaan dengan 2 pihak. Pihak pertama dengan subkontraktor yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Pihak kedua dengan mandor yang merupakan penduduk setempat. Selama



berlangsungnya pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional, masih terlihat ketidakseragaman dalam penggunaan APD oleh tenaga kerja baik dari subkontraktor maupun mandor. Ketidakseragaman dalam penggunaan APD pada lokasi kerja merefleksikan ketidakpatuhan tenaga kerja. Ketidakpatuhan tenaga kerja ini merupakan salah satu penyebab dasar dari kecelakaan kerja pada lokasi proyek, baik bagi pekerja maupun pengguna jalan. Setiap pekerja tidak akan terlepas dari risiko penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja. Oleh sebab itu para tenaga kerja harus diberi perlindungan melalui penggunaan APD. Adapun interpretasi tingkat kepatuhan tenaga kerja dari subkontraktor dan mandor dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

**Tabel 5**  
 Interpretasi tingkat kepatuhan tenaga kerja dari subkontraktor

No.	Pekerjaan dan Penggunaan APD	Tingkat Kepatuhan		
		Pakai	Persentase Pakai (%)	Interpretasi
<b>I Pemeliharaan Rutin Perkerasan</b>				
<b>1 Pengupasan dan penutupan kembali</b>				
a	Pakaian kerja	77	100%	Seluruhnya patuh
b	Helm	-	0%	Tidak satupun patuh
c	Sepatu boot	48	62,3%	Sebagian besar patuh
d	Sarung tangan	48	62,3%	Sebagian besar patuh
<b>II Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan</b>				
<b>1 Pengupasan dan penutupan kembali</b>				
a	Pakaian kerja	77	100%	Seluruhnya patuh
b	Helm	-	0%	Tidak satupun patuh
c	Sepatu boot	48	62,3%	Sebagian besar patuh
d	Sarung tangan	48	62,3%	Sebagian besar patuh
<b>2 Pengembalian kondisi</b>				
a	Pakaian kerja	77	100%	Seluruhnya patuh
b	Helm	-	0%	Tidak satupun patuh
c	Sepatu boot	48	62,3%	Sebagian besar patuh
d	Sarung tangan	48	62,3%	Sebagian besar patuh
<b>III Pemeliharaan Rutin Selokan Saluran Air Galian dan Timbunan</b>				
<b>1 Pengerukan, penggalian dan penimbunan</b>				
a	Pakaian kerja	77	100%	Seluruhnya patuh
b	Helm	-	0%	Tidak satupun patuh
c	Sepatu boot	77	100%	Seluruhnya patuh
d	Sarung tangan	48	62,3%	Sebagian besar patuh

Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional yang dilaksanakan oleh subkontraktor meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin perkerasan, pemeliharaan rutin bahu jalan, dan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan. Berdasarkan observasi, subkontraktor telah menyediakan APD bagi para tenaga kerja untuk seluruh pekerjaan tersebut. Adapun APD yang disediakan oleh subkontraktor pada lokasi proyek berupa pakaian kerja, helm, sepatu boot, dan sarung tangan. Namun APD yang telah disediakan tersebut, tidak sepenuhnya digunakan dan dipatuhi oleh para tenaga kerja. Ketidakpatuhan tenaga kerja ini disebabkan oleh tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak perusahaan subkontraktor terhadap tenaga kerja yang tidak menggunakan APD. Dalam hal ini penggunaan APD pada pekerjaan pemeliharaan rutin perkerasan, dan pemeliharaan rutin bahu jalan diperoleh sebesar 56%, sementara pada pekerjaan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan diperoleh sebesar 66%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja patuh dalam penggunaan APD, pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional yang dilaksanakan oleh pihak subkontraktor.

**Tabel 6**

Interpretasi tingkat kepatuhan tenaga kerja dari mandor

No.	Pekerjaan dan Penggunaan APD	Tingkat Kepatuhan		
		Pakai	Persentase Pakai (%)	Interpretasi
<b>I</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Perkerasan</b>			
2	Pengembalian kondisi			
a	Pakaian kerja	39	100%	Seluruhnya patuh
b	Helm	-	0%	Tidak satupun patuh
c	Sepatu boot	24	61,5%	Sebagian besar patuh
d	Sarung tangan	24	61,5%	Sebagian besar patuh
<b>III</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Selokan Saluran Air Galian dan Timbunan</b>			
1	Pengerukan, penggalian dan penimbunan			
a	Pakaian kerja	39	100%	Seluruhnya patuh
b	Helm	-	0%	Tidak satupun patuh
c	Sepatu boot	24	61,5%	Sebagian besar patuh
d	Sarung tangan	24	61,5%	Sebagian besar patuh
<b>IV</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan</b>			
1	Perbaikan			
a	Pakaian pelindung api	-	0%	Tidak satupun patuh
b	Kaos tangan tahan api	-	0%	Tidak satupun patuh
c	Baju las/apron	-	0%	Tidak satupun patuh
d	Topi baja	-	0%	Tidak satupun patuh
e	Kaca mata pelindung	20	51,3%	Sebagian besar patuh
f	Lensa penyaring	-	0%	Tidak satupun patuh

Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional yang dilaksanakan oleh mandor meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin perkerasan, pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan, dan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan. Berdasarkan observasi, mandor tidak menyediakan APD secara lengkap untuk para tenaga kerja pada seluruh pekerjaan tersebut. Adapun APD yang disediakan oleh mandor pada lokasi proyek berupa pakaian kerja, helm, sepatu boot, dan sarung tangan, sedangkan APD yang tidak disediakan adalah pakaian pelindung api, kaos tangan tahan api, baju las/apron, topi baja, dan lensa penyaring. APD yang telah disediakan ini, juga tidak sepenuhnya digunakan dan dipatuhi oleh para tenaga kerja. Ketidakpatuhan tenaga kerja ini disebabkan oleh tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak mandor terhadap tenaga kerja yang tidak menggunakan APD. Selain itu ketidakpatuhan tenaga kerja ini juga disebabkan oleh mandor tidak mengimplementasikan program K3 secara baik, dengan menyediakan APD secara memadai pada seluruh pekerjaan. Dalam hal ini penggunaan APD pada pekerjaan pemeliharaan rutin perkerasan, dan pekerjaan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan diperoleh sebesar 56%, sementara pada pemeliharaan rutin perlengkapan jalan diperoleh sebesar 9%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, dan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan sebagian besar tenaga kerja patuh, sedangkan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan sebagian kecil tenaga kerja patuh dalam penggunaan APD, yang dilaksanakan oleh pihak mandor.

Secara umum tingkat kepatuhan tenaga kerja dari subkontraktor diperoleh sebesar 59%, dan tingkat kepatuhan tenaga kerja dari mandor diperoleh sebesar 40%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar tenaga kerja dari subkontraktor patuh, dan hampir setengah tenaga kerja dari mandor patuh dalam penggunaan APD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja yang mempunyai tingkat kepatuhan tinggi dalam penggunaan APD, pada seluruh pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional adalah tenaga kerja dari subkontraktor. Untuk meningkatkan kepatuhan tenaga kerja dari subkontraktor dan mandor perlu dilakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Sosialisasi penting dilakukan secara berkala agar dapat

terjadi penyegaran pengetahuan bagi tenaga kerja tersebut. Sosialisasi yang baik dari subkontraktor dan mandor diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan tenaga kerja dalam menggunakan APD.

### 4.3 Pemilihan Metode Penyedia Jasa pada Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional

Penyedia jasa yang digunakan oleh PPK dalam pemeliharaan rutin jalan nasional pada ruas jalan Blangkejeren – Laweanan, adalah pihak subkontraktor dan mandor. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional tersebut terdiri atas 4 pekerjaan. Pekerjaan pertama yaitu pemeliharaan rutin perkerasan, pada bagian pengupasan dan penutupan kembali dilaksanakan oleh pihak subkontraktor, sedangkan pada bagian pengembalian kondisi dilaksanakan oleh pihak mandor. Pekerjaan kedua yaitu pemeliharaan rutin bahu jalan, pada bagian pengupasan dan penutupan kembali, dan pengembalian kondisi seluruh bagian pekerjaannya dilaksanakan oleh pihak subkontraktor. Pekerjaan ketiga yaitu pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan, pada bagian pengerukan penggalian dan penimbunan di lokasi proyek sama-sama dilaksanakan oleh pihak subkontraktor dan mandor. Pekerjaan keempat yaitu pemeliharaan rutin perlengkapan jalan, pada bagian perbaikan dilaksanakan oleh pihak mandor. Adapun pemilihan penyedia jasa pada masing-masing pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7**

Pemilihan penyedia jasa pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan

No.	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional	Tingkat Risiko	Metode Penyedia Jasa Tenaga Kerja	
			Subkontraktor	Mandor
1	Pemeliharaan rutin perkerasan	Rendah	√	√
2	Pemeliharaan rutin bahu jalan	Rendah	√	-
3	Pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan	Sedang	√	-
4	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	Rendah	-	√

Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional sepanjang 65 Km pada ruas jalan Blangkejeren - Laweanan, mempunyai tingkat risiko K3 tersendiri. Pekerjaan pemeliharaan yang memiliki risiko rendah terdapat pada pemeliharaan rutin perkerasan, pemeliharaan rutin bahu jalan, dan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan, sedangkan pekerjaan yang memiliki risiko sedang terdapat pada pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan. Risiko sedang mempunyai porsi lebih dari pekerjaan yang berisiko rendah. Pekerjaan yang berisiko sedang haruslah dilaksanakan oleh tenaga kerja yang mempunyai tingkat kepatuhan tinggi dalam penggunaan APD. Hal tersebut berguna untuk menghindari timbulnya risiko yang dapat berdampak pada orang, harta benda, lingkungan dan keselamatan umum. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan tenaga kerja yang tinggi didapat dari pihak subkontraktor. Oleh karena itu untuk pekerjaan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan, penyedia jasa yang tepat ditetapkan pada tenaga kerja dari subkontraktor. Metode penyedia jasa yang berubah dari sebelumnya, hanyalah pada pekerjaan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan, dengan memperkerjakan tenaga kerja dari pihak subkontraktor.

### 4.4 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Pangkey (2012) menunjukkan bahwa program SMK3 telah direncanakan dan diterapkan dengan baik di lokasi proyek Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno - Manado. Standar dan pedoman yang digunakan untuk mengatur sistem ini disusun dalam Rencana Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Proyek (RMK3LP). Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penerapan program K3, dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan nasional di ruas jalan Blangkejeren - Laweanan. Implementasi dari program K3 tidak berjalan baik, yang terlihat dari adanya ketidakpatuhan tenaga kerja baik dalam penggunaan APD. Ketidakpatuhan tenaga kerja ini disebabkan oleh tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak subkontraktor dan mandor terhadap tenaga kerja yang tidak menggunakan APD. Selain itu ketidakpatuhan tenaga kerja ini juga disebabkan oleh mandor tidak

mengimplementasikan program K3 secara baik, dengan menyediakan APD secara memadai pada seluruh pekerjaan. Adapun APD yang belum disediakan oleh mandor adalah pakaian pelindung api, kaos tangan tahan api, baju las/apron, topi baja, dan lensa penyaring. Pada proyek juga tidak terdapat standar dan pedoman RMK3LP, sehingga implementasi program K3 tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Andarini (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan K3 pada konstruksi pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya diterapkan. Pengetahuan K3 perlu ditingkatkan untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hal yang sama, bahwa program K3 tidak sepenuhnya diterapkan pada kegiatan pemeliharaan jalan rutin nasional di ruas jalan nasional di ruas jalan Blangkejeren - Laweunan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakseragaman dalam penggunaan APD oleh tenaga kerja. Ketidakseragaman dalam penggunaan APD pada lokasi kerja merefleksikan ketidakpatuhan tenaga kerja. Ketidakpatuhan tenaga kerja ini merupakan salah satu penyebab dasar dari kecelakaan kerja pada lokasi proyek, baik bagi pekerja maupun pengguna jalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sepang (2013) menunjukkan bahwa kriteria kecelakaan tertinggi yaitu terjatuhnya pekerja dengan risk level L (*Low*) sebesar 52% dan sub-kriteria kecelakaan tertinggi yaitu pekerja terjatuh dari tangga dengan risk level L sebesar 52%. Untuk kriteria faktor utama penyebab kecelakaan tertinggi adalah faktor manusia dengan risk level L sebesar 56% dan sub-kriteria faktor penyebab kecelakaan tertinggi adalah tidak memakai APD dengan risk level L sebesar 56%. Hasil identifikasi risiko K3 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional di ruas jalan Blangkejeren - Laweunan terdapat 2 tingkatan yakni risiko rendah dan sedang. Dalam hal ini yang risiko rendah terdapat pada pekerjaan pemeliharaan rutin perkerasan, pemeliharaan rutin bahu jalan, dan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan. Risiko sedang terdapat pada pekerjaan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **5.1 Kesimpulan**

1. Tingkat risiko K3 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional untuk pemeliharaan rutin perkerasan, pemeliharaan rutin bahu jalan, dan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan mempunyai risiko rendah, sedangkan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan mempunyai risiko sedang.
2. Tingkat kepatuhan tenaga kerja dari subkontraktor lebih tinggi yaitu sebesar 59%, dibandingkan kepatuhan tenaga kerja dari mandor yaitu sebesar 40%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar tenaga kerja dari subkontraktor patuh, dan hampir setengah tenaga kerja dari mandor patuh dalam penggunaan APD.
3. Pekerjaan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan, penyedia jasa yang tepat ditetapkan pada tenaga kerja dari subkontraktor, karena memiliki tingkat kepatuhan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja dari mandor.

##### **5.2 Saran**

1. Disarankan pihak subkontraktor dan mandor ikut memberikan sosialisasi kepada tenaga kerja, agar menimbulkan kesadaran akan pentingnya penggunaan APD pada lokasi proyek.
2. Disarankan pihak kontraktor dan mandor dapat memberikan sanksi yang tegas bagi tenaga kerjanya yang tidak mematuhi aturan program K3 dalam penggunaan APD.
3. Disarankan pihak mandor untuk menyediakan APD yang memadai seperti pakaian pelindung api, kaos tangan tahan api, baju las/apron, topi baja, dan lensa penyaring, agar implementasi dari program K3 dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andarini, P 2017, *Evaluasi Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan di Dinas kimpraswil Kota Yogyakarta*, Jurnal, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Ervianto, WI 2005, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta.
- Griffin, MA and Neal, A 2004, *Safety Climate and Safety at Work, The Psychology of Workplace Safety (Eds. Barling, J, & Michael R.F)*, American Psychology Association, Washington.
- Heinrich, HW 1980, *Industrial Accident Prevention*, Mc. Graw Hill Book Company, New York.
- Kepmenaker R.I. No. Kep. 463/MEN/1993, *Tentang Pola Gerakan Nasional*.
- Pangkey, F 2012, *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Konstruksi Di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado)*, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 2 No. 2, ISSN: 2087-9334, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Permen PU No. 13/PRT/M/2011, *Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan*.
- Permen PU No. 05/PRT/M/2014, *Tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum*.
- Perpres R.I No. 54 Tahun 2010, *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Rani, HA, Amin, J, Gunawan, R 2017, *The Factors Identification of The Work Safety and Health (K3) Program Application in The Fly Over Project Construction in Banda Aceh*, Proceeding of Aceh Global Health International Conference.
- Sepang, B, AW 2013, *Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado*, Jurnal Sipil Statik Vol. 1 No. 4, ISSN: 2337-6732, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Wardani, 2009, *Riset Sumber Daya Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## FORMAT REVIEW JURNAL 1

<b>Judul</b>	ANALISIS STRATEGI BISNIS PADA PT. OMEGA INTERNUSA SIDOARJO
<b>Jurnal</b>	-
<b>Volume dan Halaman</b>	AGORA Vol. 5, No. 1, (2017)
<b>Tahun</b>	2017
<b>Penulis</b>	Cinthy Erika Putri Gunawan
<b>Reviewer</b>	Rayendra Bambang Hirawan
<b>Tanggal</b>	13/08/2021
<b>Tujuan Penelitian</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi usaha yang sudah dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat bertahan dari tekanan persaingan yang semakin ketat di pasar.
<b>Subjek Penelitian</b>	Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa lingkungan eksternal menggunakan analisa PEST dan lima kekuatan Porter serta menggunakan lingkungan internal melalui fungsi bisnis.
<b>Metode penelitian</b>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
<b>Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persaingan Antar Perusahaan Sejenis</li><li>b. Potensi Masuknya Pesaing Baru</li><li>c. Potensi Pengembangan Produk Pengganti</li><li>d. Daya Tawar Pemasok</li><li>e. Daya Tawar Konsumen</li></ol>
<b>Kekuatan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan harga yang lebih murah.</li><li>2. Selalu menjaga kualitas.</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelayanan yang memuaskan.</li> <li>4. Memiliki armada sendiri untuk mengirim barang.</li> <li>5. Memiliki hubungan yang baik dengan pemasok dan konsumen.</li> </ol>
<b>Kelemahan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi kurang strategis.</li> <li>2. Pemasok tidak banyak.</li> <li>3. Tidak ada pelatihan khusus yang diberikan kepada karyawan.</li> <li>4. Produk yang dijual tidak pernah diiklankan.</li> </ol>
<b>Kesimpulan</b>	<p>Kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT. Omega Internusa adalah persaingan antar perusahaan sejenis dan potensi masuknya pesaing baru karena cukup banyak berdiri perusahaan sejenis dan bisa di bilang cukup tinggi pesaing di industri ini terutama pesaing dari pemain lama.</p>

## FORMAT REVIEW JURNAL 2

<b>Judul</b>	PENYUSUNAN STRATEGI BISNIS DAN STRATEGI OPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PERUSAHAAN KONVEKSI SCISSORS DI SURABAYA
<b>Jurnal</b>	Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Tahun 7. No. 3, Desember 2014
<b>Volume dan Halaman</b>	-
<b>Tahun</b>	2014
<b>Penulis</b>	Mochamad Ammar Faruq & Indrianawati Usman
<b>Reviewer</b>	Rayendra Bambang Hirawan
<b>Tanggal</b>	13/08/2021
<b>Tujuan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan alternatif strategi bisnis yang tepat bagi Konveksi Scissors.</li><li>2. Merumuskan alternatif strategi operasi yang mendukung strategi bisnis bagi Konveksi Scissors</li></ol>
<b>Subjek Penelitian</b>	Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa subyek atau obyek penelitian (seseorang, masyarakat, organisasi dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
<b>Metode penelitian</b>	Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptifeksploratif.
<b>Hasil Penelitian</b>	Dari hasil matriks Grand Strategy, Konveksi Scissors berada pada kuadran I. Menurut David (2010:348) perusahaan yang berada dalam kuadran I memiliki



	posisi strategis yang sempurna. Konsentrasi pada pasar (penetrasi pasar dan pengembangan pasar) dan produk (pengembangan produk) yang ada saat ini merupakan strategi yang sesuai, jika perusahaan mempunyai kelebihan sumber daya, maka strategi integrasi ke belakang, integrasi ke depan, atau strategi horizontal bisa menjadi strategi yang efektif.
<b>Kekuatan Penelitian</b>	Strategi yang diterapkan dengan baik dan tepat akan mengantisipasi masalah dan kesempatan di masa mendatang pada kondisi perusahaan yang berubah dengan cepat, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan usaha yang dinamis seperti saat ini
<b>Kelemahan Penelitian</b>	Perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh Konveksi Scissors dalam perumusan strategi bisnis dan operasinya terhadap terhadap pengembangan kinerja UKM dengan cara melakukan perumusan strategi bisnis dan strategi operasi yang Mochamad Ammar Faruq Indrianawati Usman terintegrasi dengan baik sehingga nantinya dapat diimplementasikan oleh Konveksi Scissors dan diharapkan sesuai dengan karakteristik UKM di Indonesia
<b>Kesimpulan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang Konveksi Scissors yang teridentifikasi yaitu berupa permintaan konsumen akan produk/desain yang selalu baru, banyaknya kaum muda saat ini, bertumbuhnya distro/toko fashion sebagai peluang kerjasama, kreatifitas desain yang semakin berkembang, tren fashion khususnya kaos yang selalu berubah. Sedangkan Ancaman Konveksi Scissors berupa harga</li> </ol>

	<p>pesaing yang lebih murah, meningkatnya pesaing dalam industri sejenis, kondisi ekonomi yang fluktuatif atau tidak stabil, harga bahan baku yang selalu meningkat dan nama atau merek pesaing yang lebih dahulu dikenal.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="703 524 1361 1167">2. Kekuatan Konveksi Scissors yang teridentifikasi meliputi desain dan kualitas sablon yang inovatif, harga produk kompetitif, kualitas bahan produk yang baik, pelayanan yang sesuai permintaan dan loyalitas pekerja yang baik. Sedangkan Kelemahan Konveksi Scissors antara lain kurangnya jumlah SDM, sistem pemasaran yang masih konvensional atau sederhana, kapasitas produksi yang belum maksimal, belum banyak yang mengenal Konveksi Scissors dan keterlambatan pengiriman.</li><li data-bbox="703 1189 1361 1659">3. Berdasarkan hasil pengolahan pada tahap akhir menggunakan matriks QSPM, alternatif strategi bisnis yang sesuai dengan Konveksi Scissors adalah pengembangan produk untuk desain dan inovasi. Dalam strategi ini Konveksi Scissors sebaiknya memperbaiki produk yang sudah ada dan mengembangkan yang baru dengan harga murah dalam upaya meningkatkan penjualan.</li><li data-bbox="703 1682 1361 1995">4. Alternatif strategi operasi Konveksi Scissors yang sesuai adalah strategi inovasi dan variasi produk serta fleksibilitas dan ketepatan waktu pengiriman untuk memenuhi permintaan konsumen. Sedangkan kebijakan operasi adalah pemakaian tim dan partisipasi</li></ol>
--	--

	<p>konsumen dalam mendesain dan merancang produk baru dan cepat beradaptasi terhadap perubahan serta penggunaan pekerja yang berketerampilan tinggi.</p>
--	--

### FORMAT REVIEW JURNAL 3

<b>Judul</b>	Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi Covid-19
<b>Jurnal</b>	Jurnal IKRA-ITH Ekonomika
<b>Volume dan Halaman</b>	Vol 4 No 1 Bulan Maret 2021
<b>Tahun</b>	2021
<b>Penulis</b>	Maskarto Lucky Nara Rosmadi
<b>Reviewer</b>	Rayendra Bambang Hirawan
<b>Tanggal</b>	13/08/2021
<b>Tujuan Penelitian</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi usaha yang sudah dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat bertahan dari tekanan persaingan yang semakin ketat di pasar.
<b>Subjek Penelitian</b>	Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa data yang dikumpulkan, yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara yang tidak terstruktur ke sumber informasi (informan kunci dan informan).
<b>Metode penelitian</b>	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
<b>Hasil Penelitian</b>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa strategi bisnis dalam memasarkan hasil produksinya adalah melalui media sosial. Dari hasil penelitian di atas, maka dapat diuraikan bahwa strategi ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan memperhatikan daya beli konsumen di masa pandemi covid-19 ini.</p> <p>Hasil penelitian yang dilakukan pada usaha kecil</p>

	<p>diketahui bahwa untuk keberlangsungan usahanya Waroenk Ngemil berupaya untuk memasarkan produk makanannya secara optimal. Strategi pemasaran yang digunakan di tengah pandemi covid-19 yaitu dengan menggunakan media sosial, antara lain, facebook, instagram, Whatsapp, telegram, serta tergabung dalam usaha online lainnya seperti shopee, go-food, dan grap-food.</p>
<p><b>Kekuatan Penelitian</b></p>	<p>Penerapan strategi yang tepat selain dapat mempertahankan kelangsungan usaha kecil juga dapat memperluas jaringan pemasaran yang berdampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil di masa yang akan datang.</p>
<p><b>Kelemahan Penelitian</b></p>	<p>Penggunaan teknologi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi.</p>
<p><b>Kesimpulan</b></p>	<p>Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan kelangsungan usaha kecil (UMKM) pemanfaatan internet dan media sosial merupakan strategi yang sangat tepat di tengah pandemi covid-19 ini.</p>

## LITERATUR REVIEW JURNAL

No	Judul	Penulis	Masalah dan Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Kesimpulan	Taxonomy
1.	Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan di Kota Makassar	Dahyar Daraba, Alim Bachri Subianto, Rudi Salam	<p>1. Masalah Penelitian ini yaitu Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan di Kota Makassar.</p> <p>2. Tujuan Penelitian untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan di Kota Makassar.</p>	Pendekatan kualitatif deskriptif.	<p>Upaya yang dilakukan dalam mendukung kinerja Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja ada beberapa hal yang menjadi perhatian seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rekrutment dan Pelatihan Tenaga Kerja,</li> <li>2) pengadaan sarana dan prasarana kantor,</li> <li>3) Penyimpana Sarana dan Prasarana Kantor,</li> <li>4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,</li> <li>5) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kantor,</li> <li>6) Laporan Sarana dan Prasarana Kantor.</li> </ol>	<p>Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rekrutment dan Pelatihan Tenaga Kerja,</li> <li>2) Pengadaan sarana dan prasarana kantor,</li> <li>3) Penyimpanan Sarana dan Prasarana Kantor,</li> <li>4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,</li> <li>5) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kantor,</li> <li>6) Laporan Sarana dan Prasarana Kantor. Dari keenam upaya tersebut, masih terdapat kekurangan seperti: masih kurangnya analisis terhadap kebutuhan pegawai dengan keahlian khusus dan sistem pelatihan yang masih belum sesuai harapan. Sehingga kualitas tenaga kerja masih tergolong rendah. Selain itu, inventarisasi sarana dan prasarana kantor yang kurang terawat. Meskipun yang lain sudah terpenuhi</li> </ol>	Jurnal Nasional Terakreditasi

						akan tetapi inventaris kantor harus tetap terjaga sehingga mampu mengurangi pengeluaran dalam upaya efisiensi penggunaan kantor.	
2.	Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja di Kota Samarinda	Hariyati, Anwar As, Melati Dama	<p>1. Masalah Penelitian ini yaitu Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan di Kota Makassar.</p> <p>2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peranan Dinas Tenaga Kerja Tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja di Kota Samarinda, dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja di Kota Samarinda.</p>	Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dilihat melalui perencanaan yang diterapkan sebagai jembatan penghubung antara calon tenaga kerja dengan pemberi kerja/perusahaan. Pengkoordinasian pelaksanaan dilakukan dengan cara penyampaian informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan pengendalian yang dilakukan melalui lembaga yang berbadan khusus sesuai dengan Permenakertrans RI No.07/Men/IV/2008 untuk mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi.	<p>1. Peranan di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja, dapat dilihat melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan</li> <li>Pengkoordinasian Pelaksanaan</li> <li>Pengendalian</li> </ol> <p>2. Faktor pendukung dan penghambat Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja di Kota Samarinda :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya dasar hukumnya yang jelas</li> <li>Faktor penghambat kelancaraan peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam penempatan tenaga kerja terbatasnya sarana dan prasarana dinas operasional.</li> </ol>	Jurnal Nasional

3.	Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Perluasan Kesempatan Kerja di Yogyakarta	Bayu Prakoson	<p>1. Masalah dalam penelitian ini adalah Permasalahan keterbatasan lapangan pekerjaan di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>2. Tujuan Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pertama adalah mengetahui program perluasan kesempatan kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui kesesuaian program perluasan kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap angkatan kerja.</p>	Metode penelitian ini adalah Kuantitatif	Kebijakan perluasan kesempatan kerja, pengembangan Dinas Tenaga Kerja di Daerah Yogyakarta perlu mencontoh struktur organisasi lembaga dinas, badan dan kantor di Kabupaten Sleman. Karena Balai Latihan Kerja Pemerintah Daerah Bekerja Sama Dengan Pihak Swasta Dalam Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum berubah dalam membuat kebijakan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan perluasan kesempatan kerja masih dibuat berdasarkan sisi persediaan angkatan kerja. Program perluasan kesempatan kerja dibuat terlebih dahulu baru kemudian diajukan anggarannya. Dengan mendasarkan pada anggaran yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka daya serap program menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi masalah kesempatan kerja yang terbatas, dalam perencanaan kebijakan perluasan kesempatan kerja harus diperhatikan sisi permintaan pasar kerja. Perlu dilakukan penelitian atau kajian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagaimana memosisikan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks regional dan memosisikan kabupaten/kota dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta.	Jurnal Nasional
----	--	---------------	---	--	---	--	-----------------



## RENCANA JUDUL

### IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jurnal terkait :

#### **1. IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH**

Dibuat oleh : Leni Rohida ( Bagian Kepegawaian pada Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran- 1 Juli 2019 )

##### **Review :**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jabatan fungsional pada manajemen sumber daya manusia, serta dampaknya pada komitmen organisasi. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa jabatan fungsional mempunyai fungsi dan peran penting dalam pengembangan manajemen sumber daya, yaitu mampu menghubungkan tujuan yang strategis dan membuat individu mau berkomitmen terhadap organisasi. Dalam sebuah organisasi, manajemen sumber daya manusia berarti menerima dan melibatkan fungsi SDM sebagai mitra strategis dalam perumusan dan pelaksanaan strategi organisasi, seperti merekrut pelatihan personil dan bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

#### **2. IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PADA MANAJEMEN SDM SERTA DAMPAKNYA PADA KOMITMEN ORGANISASI**

Dibuat oleh : MERRY G. MANGINDAAN, DAUD LIANDO, JOHNY LENGKONG.  
September 2019

##### **Review :**

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis penyebab Implementasi Kebijakan Pengangkatan Dalam Jabatan Analis Kepegawaian untuk mengembangkan karir PNS di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan optimal. Metode yang digunakan adalah kualitatif.

### **3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ANALIS KEPEGAWAIAN DI BKD PROV. SULAWESI UTARA**

Dibuat oleh : Haryono ( Prodi Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran Pascasarjana  
Universitas Negeri Semarang – 27 Mei 2017 )

#### **Review :**

Kajian dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kajian dilakukan dalam bentuk studi literatur dan telaah kritis pada praktik empiris di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran di sekolah menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pendidikan persekolahan yang berkualitas.

# **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya**

**Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting**

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

## **ABSTRAK**

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Dengan menggunakan teknik regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

**Kata Kunci:** kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada

## **ABSTRACT**

*Tax compliance is a situation when taxpayers understand or try to understand all of of the tax laws and regulations by filling out tax forms fully and clearly, calculating the amount of tax payable correctly and paying the tax due on time.*

*The purpose of this study was to determine whether the taxpayer's awareness, quality of the tax authorities, tax penalties and the taxpayers have significant impact on taxpayers compliance in Surabaya either partially or simultaneously. Data were obtained from 100 respondents listed as taxpayers in KPP Sawahan Surabaya. By using multiple linear regression techniques, the results showed that the awareness of the taxpayers, the quality of the quality of the tax authorities, the tax penalties and the taxpayers have significant influence on taxpayers compliance in Surabaya.*

**Keywords:** *taxpayer awareness, quality of service tax authorities, tax sanction, taxpayer's residency environment.*

## PENDAHULUAN

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak.

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Hasil penelitian Suyatmin (2004) menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima. Dalam penelitian yang dilakukan Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak. Penelitian Jatmiko (2006) menemukan bahwa

pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. menurut Jatmiko (2006) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan analisa tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

$H_{11}$  : kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.

Menurut penelitian yang dilakukan Kahono (2003) juga menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap Wajib Pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di dalam membayar pajak. Berdasarkan analisa tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

$H_{12}$ : kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulud Kahono (2003) menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB. Berdasarkan analisa tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : sanksi perpajakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

$H_{13}$  : sanksi perpajakan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Dari definisi ini lingkungan masyarakat dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi : proses perhatian (*attentional*) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, proses penahanan (*retention*) yaitu proses mengingat tindakan suatu model, proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan, proses penguatan (*reinforcement*) yaitu proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif. Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa teori ini relevan dengan teori lingkungan Wajib Pajak berada karena seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh James dan Alley (1999) kepatuhan pajak adalah subjek yang

kompleks dengan implikasi yang luas dan yang mempengaruhi kepatuhan tersebut ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan perilaku. Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman, sanksi-sanksi yang di berikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Berdasarkan analisa tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Lingkungan Wajib Pajak berada tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

$H_{14}$  : Lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat variabel independen yaitu kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berasal langsung dari objek penelitian dan data sekunder yaitu diperoleh dari berbagai sumber informasi yaitu buku-buku, media internet dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sawahan.

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sawahan.

Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus *Solvin* seperti berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Unit analisis dari penelitian ini adalah menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Instrumen penelitian

ini menggunakan skala Likert empat poin. Instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel berjumlah 23 item pertanyaan. Sebelum dianalisis data diuji validitas dan reliabilitasnya.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Surabaya. Profile responden laki-laki sebanyak 51 orang (51%), sedangkan responden perempuan sebanyak 49 orang (49%). Sedangkan berdasarkan usia responden berusia 20 hingga 25 tahun sebanyak 13 orang (13%), responden berusia di atas 25 hingga 30 tahun sebanyak 24 orang (24%), responden berusia di atas 30 hingga 35 tahun sebanyak 43 orang (43%), responden berusia di atas 35 hingga 50 tahun sebanyak 16 orang (16%), sedangkan responden berusia di atas 50 tahun hanya 4 orang (4%).

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa korelasi antar masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total skor menunjukkan hasil yang signifikan (0,30). Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing pertanyaan adalah valid.

Untuk hasil reliabilitas, nilai *cronbach alpha* masing-masing instrumen pertanyaan menunjukkan nilai > 0,60 yang mengisyaratkan bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tersebut reliabel.

pengujian normalitas dilakukan pada nilai residual yang dihasilkan model regresi. Pengujian normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *normal probability plot*. Hasil tersebut diperkuat dengan hasil uji *kolmogorov smirnov*. Jika nilai signifikansi uji *kolmogorov smirnov* > 0,05 ( $\alpha=5\%$ ), maka residual model regresi berdistribusi normal.

Heteroskedastisitas menunjukkan adanya perbedaan varians antar residual pengamatan satu dengan pengamatan lain. Regresi yang baik tidak menunjukkan

adanya gejala heteroskedastisitas. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan *scatterplot*. Hasil tersebut diperkuat dengan korelasi *rank spearman* antara variabel bebas dengan nilai residual. Jika korelasi *rank spearman* menghasilkan nilai signifikansi > 0,05 ( $\alpha=5\%$ ), maka disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi (hubungan) yang kuat antara variabel bebas dalam model regresi. Regresi yang baik tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas. Pendeteksian ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka model regresi bebas dari multikolinieritas. Dalam penelitian ini tidak ada multikolinieritas.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat dibuat model persamaan regresi berganda yaitu :

$$Y = 0,637 + 0,334 X_1 + 0,321 X_2 + 0,152 X_3 + 0,165 X_4$$

Beberapa hal yang dapat diketahui dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut: 1) Koefisien regresi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$  bertanda positif yang berarti bahwa apabila  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$  mengalami peningkatan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Adjusted  $R^2$  hasil penelitian ini adalah 59,2% artinya 59,2% kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya dapat dijelaskan dari empat variabel yaitu kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada. Sedangkan sisanya 40,8% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar penelitian ini. 3) Hasil uji F menunjukkan angka 34,453 dengan signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya atau dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t untuk menguji hipotesis antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Berdasarkan

hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Hipotesis 1 kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hipotesis 2 kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hipotesis 3 sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,03 kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Hipotesis 4 lingkungan Wajib Pajak berada terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  diterima. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan bukti-bukti empiris yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa: kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Karena sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sendiri yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melapor. Maka dari itu apabila Wajib kesadaran Wajib Pajak tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan, apabila Wajib Pajak memahami fungsi pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan karena sistem yang berlaku adalah sistem *self assessment*. Apabila pelayanan fiskus yang diberikan baik akan membantu meningkatkan kepatuhan.

Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya, karena apabila masyarakat di tempat lingkungan Wajib Pajak berada patuh Wajib Pajak pun ikut patuh..

Secara simultan kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pengambilan keputusan mengenai kebijakan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya di masa mendatang. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi sedemikian rupa kepada pihak yang berkepentingan serta dapat digunakan sebagai bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu mendorong peneliti selanjutnya untuk mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

## DAFTAR REFERENSI

- Darma, Budi Aryo (2007), *Analisa Kepatuhan Sistem Self Assessment Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam kaitannya dengan Penerimaan Pajak KPP Cilandak Jakarta*, Program PraSarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Harjanti, Arum Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas : Studi Empiris di KPP Cilacap. *Tesis*. Program Sarjana Akuntansi Universitas Diponegoro
- Imam Ghozali (2001), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*,
- Jatmiko, Nugroho Agus (2006), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan

- Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Robbins, Stephen P. (1996) *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Jakarta : Prenhallindo.
- Simon, James., dan Alley Clinton (1999), Tax Compliance, Self-Assessment and Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, Vol. 2. No. 2.
- Sulud Kahono. (2003). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang. *Tesis* Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima
- Suyatmin. (2004), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta, *Tesis* Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Zain, Mohammad (2004), *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.



**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEWAJIBAN MORAL DAN SANKSI  
PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL**

**I Putu Adi Putra Sanjaya**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: Adiputra\_Choopy@yahoo.com/ telp. +62 85 339 102 742

**ABSTRAK**

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pembangunan nasional perlu pembiayaan pembangunan baik dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial. Pajak hotel Kota Denpasar merupakan pajak yang paling besar penerimaannya dibandingkan pajak-pajak yang lainnya. Untuk pajak hotel di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda yang didahului oleh uji asumsi klasik, yang diolah menggunakan program *SPSS for windows* versi 15.0. Berdasarkan hasil analisis, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar dengan nilai  $t_{hitung}$  masing-masing sebesar 3,043; 3,365 dan 3,755 serta memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,003; 0,001 dan 0,000.

**Kata Kunci:** faktor-faktor kepatuhan wajib pajak

**ABSTRACT**

National development is essentially organized by the government and society. In need of financing the construction of national development both domestically and abroad. The results of tax revenue in the country is a source of government funding to improve the welfare and prosperity and to tackle social problems. Tax hotel in Denpasar city is the biggest tax revenues than other taxes. To tax in Denpasar Regional Regulation No. 5 Denpasar 2011. In this study using descriptive statistical analysis of the data analysis and multiple linear regression analyzes were preceded by the classical assumption, which is processed using *SPSS for Windows* version 15.0. Based on the analysis, quality of service, moral obligation and sanction tax effect on tax compliance in paying taxes in the Revenue Service Denpasar tcount respectively 3.043, 3.365 and 3.755, as well as having significant value respectively 0.003, 0.001 and 0.000.

**Keywords:** tax compliance factors

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Dalam pembangunan nasional perlu pembiayaan pembangunan baik dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri harus terus ditingkatkan dan digali untuk membantu dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah saat ini terus meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat potensial untuk terus digali, dimana hasil dari penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial, melihat hal tersebut dibutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara (Rusydi, 2009). Semakin besar penerimaan pajak yang diterima maka semakin besar pendapatan yang didapat oleh suatu negara (Alim, 2005). Di Kota Denpasar pajak hotel merupakan pajak yang paling besar penerimaannya dibandingkan pajak-pajak yang lainnya, hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk untuk membiayai dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar. Pajak hotel untuk Kota Denpasar diatur dalam PERDA Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011. Apabila peraturan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Suryadi, 2006). Penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar masih dapat terus digali dan ditingkatkan untuk menambah penerimaan pajak daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan. Pada Tabel 1. disajikan jumlah hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

**Tabel 1.**  
**Perkembangan Pendaftaran Hotel Pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar**  
**Tahun 2008- 2012 (Dalam Unit )**

Tahun	Kategori				Jumlah
	Hotel Berbintang	Villa	Hotel Melati	Pondok Wisata	
2008	26	33	157	41	257
2009	26	35	164	45	270
2010	26	40	179	55	300
2011	26	41	186	67	320
2012	26	44	199	73	342

*Sumber : Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Tahun 2013*

Berdasarkan Tabel 1. jumlah hotel di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya perkembangan disektor pariwisata dan tingginya jumlah kunjungan wisatawan, serta banyaknya peran pengusaha dan investor yang melakukan bisnis di bidang perhotelan. Hampir setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak hotel namun tidak semua wajib pajak hotel patuh membayar pajak hotelnya dengan tepat waktu. Menurut Brown dan Mazur yang dikutip oleh Martin (2010), kepatuhan pajak adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003). Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Pengertian kepatuhan pajak menurut (James, 2004), yaitu wajib pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Masih rendahnya kewajiban moral wajib pajak hotel dapat dilihat adanya tunggakan yang cukup besar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Pada Tabel 1.2 disajikan jumlah tunggakan dan denda pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

**Tabel 2.**  
**Tunggakan Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2008-2012**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

Tahun	Tunggakan
2008	330.847.759
2009	329.123.507
2010	18.849.082
2011	355.435.716
2012	532.407.934

*Sumber : Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Tahun 2013*

Berdasarkan Tabel 2 tunggakan pajak hotel di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan 2012, peningkatan ini mengindikasikan semakin menurunnya kewajiban moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak hotel. Tahun 2010 terjadi penurunan tunggakan sebesar Rp. 310.274.425. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 kembali terjadi kenaikan tunggakan yang cukup besar. Besarnya tunggakan pajak hotel ini mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi pasca krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia. Melihat tunggakan pajak diatas menandakan bahwa wajib pajak masih belum patuh akan kewajibannya membayar pajak hotel yang dikelola. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang besar dan serius bagi para pembuat dan pengamat kebijakan ekonomi adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan pajak dimana wajib pajak mengajukan dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos,2009).

Untuk mengatasi tunggakan pajak yang setiap tahun meningkat diperlukan kualitas pelayanan, kewajiban moral dari wajib pajak dan sanksi perpajakan yang dibuat dari pemerintah Kota Denpasar. Kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban

perpajakannya. Kualitas secara sederhana adalah suatu kondisi yang dinamis dan berhubungan dengan jasa manusia, proses, produk, dan lingkungan yang memenuhi dari harapan seseorang/pihak yang menginginkannya (Supadmi, 2009:217). Menurut Burhanudin (2009) kualitas pelayanan merupakan sikap atau pertimbangan global tentang pengertian keuangan terhadap suatu pelayanan.

Kualitas pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan layanan (Cronin, 1992). Pelayanan terjadi melalui interaksi manusia, kontak antar layanan pelanggan dengan karyawan selama pelayanan berlangsung sangat menentukan tingkat kualitas pelayanan yang disampaikan kepada pelanggan (Muchtar Hidayat, 2010). Selain itu harapan dan keinginan masyarakat selaku wajib pajak harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan agar terciptanya rasa puas dari masyarakat/wajib pajak (Parasuraman, 1985).

Kualitas pelayanan menurut Chen and Tan (2004) dalam Ussahawanichakit (2008) merupakan perbandingan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan apa yang diperolehnya. Pelanggan umumnya memerlukan produk barang atau jasa yang dapat diterima dan dinikmati dengan pelayanan yang baik dan memuaskan (Wiyono, 2006). Setiap organisasi atau perusahaan berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggannya dengan memperbaiki kualitas pelayanan (Jaman, 2009). Jika pelanggan puas dengan pelayanan dan kinerja yang ditawarkan oleh organisasi, maka pelanggan akan membalas dengan memberikan penilaian yang tinggi (Purwanto, 2004). Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2002) ada Lima dimensi yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan adalah bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.

Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajsen, 2002). Menurut Wenzel (2005) moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib

pajak. Kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya (Ho, 2009).

Selain kualitas pelayanan dan keajiban moral dari wajib pajak diperlukan juga sanksi perpajakan. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak dimana sanksi perpajakan bisa dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2009:47). Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut Ali *et al* (2001) sanksi perpajakan dan audit adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut mendorong kita untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan dapat dibenahi. Sanksi yang dikenakan dalam jumlah yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh (Wahyu, 2008).

Dinas Pendapatan Kota Denpasar merupakan instansi pemerintah yang melakukan pelayanan perpajakan, di instansi ini para wajib pajak hotel membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Di Kota Denpasar sudah menerapkan *self assesment system*, dimana pelanggan atau wajib pajak mengurus dan memperhitungkan pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Anjarini (2012) mengatakan bahwa *self assesment system* selama ini dalam prinsipnya telah membuat anggapan bahwa pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan. Diantaranya *self assesment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) yang terjadi di warga masyarakat untuk membayar pajak dengan sukarela (*Voluntary compliance*) (Darmayanti, 2004). Tapi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya

penerimaan pajak dan banyaknya tunggakan wajib pajak. Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Riahi, 2004). Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu di ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan (Doran, 2009). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery Setiawan, 2011).

Berdasarkan landasan teori hasil penelitian sebelumnya diatas maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

H<sub>2</sub> : Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

H<sub>3</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang berkedudukan di Jalan Letda Tantular No. 12 Denpasar. Alasan memilih Dinas Pendapatan Kota Denpasar karena kantor ini merupakan tempat pelayanan dan pembayaran pajak hotel Daerah Kota Denpasar, jumlah hotel di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kualitas Pelayanan dalam penelitian ini dinyatakan dalam 5 dimensi Bukti Langsung, Keandalan (*reliability*), Daya Tanggap (*responsiveness*), Jaminan (*assurance*), Empati.

Seseorang dalam dirinya memiliki kewajiban moral, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela yang dapat dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan khusus wajib pajak hotel.

Sanksi perpajakan adalah tindakan dan hukuman untuk memaksa wajib pajak menaati ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Kamus Umum Bahasa Indonesia (Devano,2006:110) kepatuhan berarti patuh atau tunduk kepada aturan.

Responden penelitian ini adalah minimal karyawan hotel atau staf accounting dan pajak yang bekerja di hotel tersebut dengan masa kerja minimal 1 tahun, karena wajib pajak ini yang dapat menikmati pelayanan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar tersebut.

Populasi merupakan wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2007:115). Populasi penelitian ini wajib pajak hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Sampel merupakan jumlah dan karakteristik yang dalam populasi tersebut (Sugiyono,2007:116). Metode aksidental sampling digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2008:122) aksidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bila orang yang kebetulan ditemui dipandang cocok sebagai sumber data.

Kriteria responden penelitian ini adalah seluruh wajib pajak hotel di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan sampel seratus wajib pajak hotel. Jumlah seratus wajib pajak hotel dalam sampel diperoleh dari hasil rumus Slovin (Husein, 2008:78) :

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)} \dots\dots\dots (1)$$

- n = Jumlah anggota sampel
- N = Jumlah anggota populasi
- e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel :



$$n = \frac{342}{(1 + 342(0,1)^2)}$$

$$n = 99,70$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar sebesar 342 wajib pajak. Data dalam penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden. Karakteristik dari responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Untuk mengetahui proporsi wajib pajak hotel Laki-Laki dan Perempuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jenis kelamin dapat sebagai acuan penelitian ini. Sebagian besar responden penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 71 orang (71%) dan 29 orang responden (29%) perempuan. Umur responden menggambarkan tingkat kedewasaan atau pengalaman seseorang dalam mengambil keputusan yang menjadi responden dengan jumlah tertinggi yaitu golongan umur 45 sampai dengan 49 tahun sebanyak 22 orang responden (22%) dan jumlah yang terendah yaitu golongan umur 60-64 tahun sebanyak 1 orang responden (1%). Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan intelektualitas yang dimiliki oleh responden dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing responden. Responden dengan tingkat pendidikan S1 merupakan responden dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 41 orang responden (41%).

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum variabel kualitas pelayanan sebesar 36, nilai maksimum sebesar 72 dan rata-rata sebesar 54,77. Deviasi standar kualitas pelayanan 7,889. Berdasarkan hasil analisis deskriptif perbedaan nilai kualitas pelayanan yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya 7,889. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel kewajiban moral mempunyai nilai minimum 5, nilai maksimum 16, rata-rata 13,39, dan deviasi standar 1,994. Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai minimum 9, nilai

maksimum 20, rata-rata 16,24 dan deviasi standar 2,892. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum 9, nilai maksimum 20, rata-rata 16,24, dan deviasi standar 2,896.

Dalam menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor sehingga didapat nilai *Pearson Correlation* dilakukan dengan uji validitas. Nilai *Pearson Correlation* untuk masing-masing butir pertanyaan kualitas pelayanan berkisar antara 0,840 sampai 0,969. Hasil uji validitas instrument untuk kewajiban moral berkisar antara 0,793 sampai 0,856. Nilai *Pearson Correlation* untuk masing-masing butir pertanyaan sanksi perpajakan berkisar antara 0,684 sampai 0,833 dan untuk masing-masing butir pertanyaan kepatuhan wajib pajak berkisar antara 0,811 sampai 0,858. Semua nilai *Pearson Correlation* untuk masing-masing butir pertanyaan kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu menunjukkan nilai di atas 0,30. Berdasarkan hal tersebut berarti butir dari masing-masing pertanyaan dalam penelitian ini valid.

Pengujian yang dilakukan untuk memenuhi ketepatan dari jawaban kuesioner adalah uji reliabilitas. Instrument yang digunakan disebut reliabel jika koefisien *Cronbach Alpha* > 0,60. *Cronbach Alpha* variabel kualitas pelayanan adalah 0,956. *Cronbach Alpha* variabel kewajiban moral adalah 0,854. *Cronbach Alpha* variabel sanksi perpajakan adalah 0,882. Nilai *Cronbach Alpha* variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,887. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa *Cronbach Alpha* > 0,60. Berdasarkan hal tersebut berarti instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Hasil dari uji asumsi klasik yang diolah dengan bantuan program SPSS 15.0 for windows.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

<b>Keterangan</b>	<b>Indikator</b>	
Uji Normalitas	Kolmogorov-Smirnov Z	0,769
	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,595
Uji Multikolonieritas	<i>Tolerance</i> X <sub>1</sub>	0,579
	<i>Tolerance</i> X <sub>2</sub>	0,352
	<i>Tolerance</i> X <sub>3</sub>	0,383
	<i>VIF</i> X <sub>1</sub>	1,727
	<i>VIF</i> X <sub>2</sub>	2,840
	<i>VIF</i> X <sub>3</sub>	2,611
Uji Heteroskedastisitas	Sig. X <sub>1</sub>	0,534
	Sig. X <sub>2</sub>	0,238
	Sig. X <sub>3</sub>	0,259

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS

Hasil dari uji normalitas pada Tabel 3 menunjukkan nilai *Sig (2-Tailed)* adalah 0,595 dengan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,769. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai *Sig (2-Tailed)* (0,595) > dari *Level of Significant* (0,05), dari hasil tersebut dapat disimpulkan variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berdistribusi normal.

Hasil uji multikolonieritas pada Tabel 3 menunjukkan kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan mempunyai nilai VIF di bawah 10 dan nilai *Tolerance* diatas 0,10. Ini berarti tidak terjadi multikolonieritas kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan.

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *signifikansi* variabel bebas kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan dalam model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 5.**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Standard Error	t-hitung	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kualitas Pelayanan (X <sub>1</sub> )	0,234	0,077	3,043	0,003
	KewajibanMoral (X <sub>2</sub> )	0,332	0,099	3,365	0,001
	SanksiPerpajakan(X <sub>3</sub> )	0,356	0,095	3,755	0,000
<i>Constant</i> = 2,01783410		F-Hitung = 65,135			
<i>Adjusted R Square</i> = 0,660		Sig = 0,000			

Keterangan Tabel:

$\alpha$ = Intersep/konstanta	= 2,01783410
$\beta_1$ = Koefisien Regresi dari variabel kualitas pelayanan	= 0,234
$\beta_2$ = Koefisien Regresi dari variabel kewajiban moral	= 0,332
$\beta_3$ = Koefisien Regresi dari variabel sanksi perpajakan	= 0,356

Persamaan garis linear bergandanya adalah:

$$Y = 2,01783410 + 0,234X_1 + 0,332X_2 + 0,356X_3 + \mu \dots \dots \dots (2)$$

Persamaan dari regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta 2,01783410 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sebesar 2,01783410 apabila nilai kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan adalah nol (0). Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan (X<sub>1</sub>) = 0,234. Berdasarkan pernyataan diatas berarti kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Nilai koefisien regresi kewajiban moral (X<sub>2</sub>) = 0,332. Dalam hal ini berarti bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (X<sub>3</sub>) = 0,356. Berdasarkan pernyataan diatas berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil olahan program SPSS versi 15.0 for windows, dapat dilihat nilai F<sub>hitung</sub> sebesar 65,135 dengan tingkat signifikansi 0,000. Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh pada

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka.

Nilai  $t_{hitung} (3,043) > t_{tabel} (1,98)$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,003 < \alpha = 0,025$ ,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Berarti variabel kualitas pelayanan ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Nilai  $t_{hitung} (3,365) > t_{tabel} (1,98)$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,001 < \alpha = 0,025$ ,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Berarti variabel kewajiban moral ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Nilai  $t_{hitung} (3,755) > t_{tabel} (1,98)$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,025$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Berarti variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Dinas Pendapatan Kota Denpasar diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya agar wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diterima pada saat membayar pajak hotel. Kepuasan yang dirasakan wajib pajak atas pelayanan yang diterima dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya yang akan dapat meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan khususnya pajak hotel. Wajib pajak diharapkan lebih menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara, sehingga wajib pajak bisa meningkatkan kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak itu sendiri agar dapat memenuhi kewajibannya

dalam membayar pajak. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran serta pemerintah sebagai pengelola keuangan negara maupun daerah yang salah satunya berasal dari sektor pajak agar lebih jujur dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga wajib pajak dapat merasakan bahwa hasil pembayaran pajak mereka tidak disalahgunakan. Pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat menjaga pengenaan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran agar dapat memberikan efek jera bagi masyarakat selaku wajib pajak, agar masyarakat selaku wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak hotel dapat segera ditindak. Kemudian untuk peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak hotel selain kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan variabel independen lain seperti tingkat penghasilan wajib pajak, tarif pajak, biaya kepatuhan dan tanggung jawab moral.

## **REFERENSI**

- Anjarini, Kusujarwati, Heri Prasetyo, Buntoro, dan Irani, Lia Dahlia. Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. *Jurnal Akuntansi Perpajakan* 2012.
- Ajsen, icek. 2002 *Constructing a TBP Questionnaire : Conceptual and Mmethodological Considerations*. September (Revised January, 2006)
- Ali *et al.* 2001. The Effect Of Tax rates and Enfoercement Policies on Tax Payer Compliance. A Study of self-Employed Tax Payer. *Antlantic Economic Journal*. 29 (2): June.
- Alim, Setiadi. 2005. Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Tegnologi Informasi*, IV (2).
- \_\_\_\_\_. 2011. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011. *Tentang Pajak Hotel*.
- Burhanudin. 2009. Service Quality Dimensions in Public Sector. *Jurnal Ekonomi Bisnis & Akuntansi Ventura*, 12 (2):h:129-136.

- Cronin, J. Joseph, Steven A. Taylor. 1992. Measuring Service Quality. *Journal of Marketing*, 56: h:55-68.
- Gerald, Chau and Patrick Leung. 2009. A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2): h:34-40.
- Darmayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan Self Assessment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, X (1): h:108-109.
- Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenade Media Group.
- Devos, ken. 2009. An Investigation Into Australian Personal Tax Evaders Their Atitudes Towards Compliance and The Penalties For Non. Compliance. *Revenue Law Journal*. Vol. 19 : 155. 1 Articlez
- Doran, Michael. 2009. Tax Penaltie and Tax Compliance. *Harvard Journal On Legislation* Vol. 46, page : 111-161
- Husein, Umar. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.
- Ho, Daniel. 2009. A Study of Hongkong Tax Complience Ethics. *International Business Research*, 2 (4).
- James, Simon. Clinton, Alley. 2004. Tax Complience, Self Assessment and Tax Adminitration. *Journal Of Finance And Management In Public Service*. Vol.2, No. 2,p: 24-42
- Jaman Adi Putra, I Wayan. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kinerja Kereliasan Nasabah.*Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(2): h:151-160.
- Lederman, Leandra. 2003a. The Interplay Between Norms and Enforcement in Tax Compliance. *Ohio State Law Journal*. 64(6): h:1453-1514.
- Martin, Lumumba Omweri, Migwi S. Wanjohi, Obara Magutu, and John Mageto Mokoro. 2010. Taxpayers Attitudes and Tax Compliance Behaviour in Kenya. *African Journal of Business & Management*, 1: h:112-122.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi
- Muliari, Ni Ketut dan Ery Setiawan.2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.*Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Muchtar Hidayat. 2010. Analisis Komitmen (*Affective, Continuance dan Normative*) Terhadap Kualitas Pelayanan Pengesahan STNK Kendaraan Bermotor (Studi Empiris

- pada Kantor Bersama Samsat di Propinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 12 (1): h:11-23.
- Parasuraman, Zeithaml, Berry. 1985. A Conceptual Model of Service Quality Its Implication Future Research. *Journal of Marketing*, 49: h: 41-50.
- Purwanto Waluyo. 2004. Analisis Strategi Kualitas Pelayanan dan Kinerja Bank-Bank BPR di Jawa Tengah. *Jurnal Fokus Ekonomi*, h: 1-9.
- Rusydi, Khoiru. 2009. Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9 (1): h:61-70, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Riahi, Ahmed. 2004. Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Moral. *Journal of Bussiness and Management University of Illions at Chicago, USA. V (13): h:135–143*
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4 (2): h:214-219, Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, 4 (1): h:105-121.
- Tjiptono, Fandy. 2002. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Torgler, B (2005). Tax Morale and direct Democracy. *European Journal Of Political Economy*, 21, h:525-531.
- Ussahawanichakit, Phapruek. 2008. Effect of Organizational Learning Culture on Service Quality and Performance of Thai Accounting Firms. *International Journal of Business Research*.
- Wahyu Santoso. 2008. Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia). *Jurnal Keuangan Publik*, 5 (1): h:85-138.
- Wiyono, Slamet. 2006. Studi Tentang Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen di Rumah Sakit Islam Manisrenggo Klaten. *Jurnal Manajemn Daya Saing*, 2 (2): h:188-197.
- Wenzel, M. 2005. Motivation or Rationalization Casual Relation Between Etichs, Norms and Tax Compliance. *Journal Of Economics Psychology*. 26(24). 491-208.





## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Andrea Meylita Widyasti Parera\*  
 Teguh Erawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
 \*email: lita\_parera@yahoo.com

### ABSTRACT

*This study aimed to examine the effect of awareness of taxpayers, tax penalties, tax knowledge, and service tax authorities on tax compliance and building earth. The sampling technique in this study using a convenience sampling (convenience sampling) to 110 taxpayer earth and office buildings in the Department of Revenue, Finance and Asset Management Area (DPPKAD) Yogyakarta that meet the criteria.*

*The data used are primary data through questionnaires, which contain a respondent's answers. Analysis of the data in this study using descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The first hypothesis: awareness taxpayer positive effect on tax compliance on land and buildings, both: tax penalty positive effect on tax compliance on land and buildings, three: knowledge of taxation positive effect on tax compliance on land and buildings, a fourth: the service tax authorities positive effect on tax compliance and building earth. The fourth hypothesis can be proved by the results of the study showed that awareness of taxpayers, tax penalties, tax knowledge, and service fiskus positive effect on tax compliance and building earth.*

### INFO ARTIKEL

Diterima: 18 April 2017  
 Direview: 18 April 2017  
 Disetujui: 12 Juni 2017  
 Terbit: 13 Juni 2017

#### Keywords:

*Awareness of taxpayers, tax penalties, tax knowledge, Service tax authorities, taxpayers Compliance*

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak (Lusia dkk, 2013). Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan iuran

yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011) dalam (Imam dan Dewi,2015). Pemerintah Kota setiap tahunnya

mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna.

Tabel 1.1

Tabel Realisasi Surat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Ketetapan		Realisasi		Persentase	
	Wajib Pajak	Rupiah	Wajib Pajak	Rupiah	Wajib Pajak	Rupiah
2014	95.359	42.700.000.000	63.674	43.753.961.720	64,11	75,69
2015	91.635	50.000.000.000	60.441	46.171.820.767	64,38	76,06
2016	90.685	53.000.000.000	61.531	49.757.915.885	60,24	60,05

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Yogyakarta, Januari 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa presentase wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak menurun tiap tahun, dimana tahun 2014 terdapat 64,11% wajib pajak yang membayar kewajiban PBBnya, tahun 2015 64,38% dan tahun 2016 60,24% selain itu, presentase realisasi pendapatan daerah dari PBB terhadap ketetapannya menurun drastis di tahun 2014, dimana realisasi PBB tahun 2014 75,69%, tahun 2015 76,06%, dan tahun 2016 60,05%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun perhitungan PBB dilakukan secara official asesment system, namun diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya.

Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak.

Kata sanksi dalam kamus bahasa Indonesia berarti tanggungan(tindakan,hukuman,dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan(Mardiasmo,2003:39 dalam Sri Mutia,2014).

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
- Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
- Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
- Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Kajian Teori Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

### Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Soemitro, 2006:1) dalam (Nafilah, 2013) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak

### Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian kepatuhan pajak menurut (Zain, 2003:31) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Leni Samira, 2015).

### Kesadaran wajib pajak

Menurut (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) kesadaran berpengaruh positif terhadap

kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

### Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Agus Nugroho Jatmiko, 2006).

### Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

### Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

### Penelitian Terdahulu

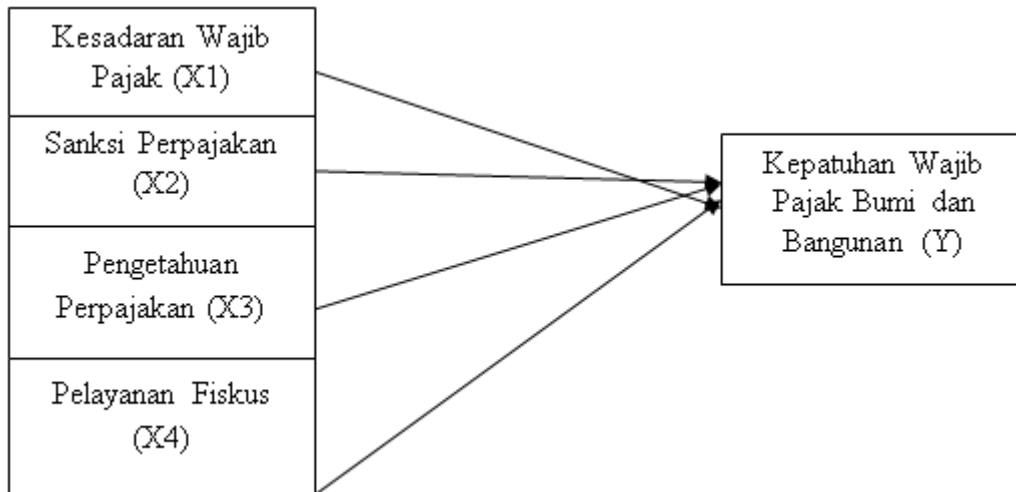
Penelitian oleh Kadek Suciningsih dkk(2015) tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan dari sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kualitas

pelayanan, kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

**Kerangka Pikir Penelitian**

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian**

Dengan adanya kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan, artinya apabila tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus naik maka kepatuhan wajib pajak juga akan naik. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus turun maka kepatuhan wajib pajak akan turun.

**Pengembangan Hipotesis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Yusdinar dkk(2015) dalam (Purwanti,2016) wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela.

Penelitian oleh Nila Puspita,2016 menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran

wajib pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, pada kecamatan padang utara menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Eken Patmasari,dkk 2016 tentang Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri menunjukkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan negatif, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan negatif, sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

**Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya ( Hutagaol, 2007:8) dalam (Sri Mutia,2014)

Penelitian oleh Aprilia dan P D'yan,2012 tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB diketahui bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP Pratama Denpasar Timur.

Hasil Penelitian Laura Yohana,2016 tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat(Banyu Utomo,2011).

Penelitian oleh Banyu Utomo,2011 tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan menunjukkan secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

### **Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Rahayu (2010) dalam Rizky Widowati(2015) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Penelitian oleh Imam dan Dewi,2015 tentang pengaruh pemahaman wajib pajak,kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menunjukkan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta.

H4 : Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Tempat dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta.Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak di

Kota Yogyakarta. Pengumpulan data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada pamong yang diambil sebagai sampel sebanyak 110 orang. Penyebaran kuisioner dilakukan pada tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 5 Januari 2016. Dengan melibatkan 110 responden yang merupakan masyarakat wajib pajak di Kota Yogyakarta.

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Metode deskriptif statistik

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara

mendesripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

b. Metode analisis regresi linear berganda ,

Metode ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus yaitu dalam bentuk langsung dan tidak langsung terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan* di Kota Yogyakarta. Dengan regresi berganda.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil Analisis Deskriptif

a. Deskriptif Variabel Penelitian

**Tabel 1**  
**Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	110	1,83	4.83	3.806	0.572
Sanksi Perpajakan	110	1.00	5.00	3.536	0.941
Pengetahuan Perpajakan	110	1.71	4.86	3.478	0.683
Pelayanan Fiskus	110	2.57	4.56	3.690	0.355
Kepatuhan Wajib Pajak	110	2.57	4.71	3.832	0.418

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak memiliki penilaian yang tinggi terhadap kesadaran wajib pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,70 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti kesadaran wajib pajak berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara, dengan membayar pajak bumi dan bangunan berarti ikut membangun daerah, penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan merupakan pendapatan daerah yang sangat potensial, penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu penerimaan yang penting bagi pembangunan daerah, dan pajak bumi dan bangunan sifatnya memaksa dan ditetapkan oleh undang-undang.

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap sanksi perpajakan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,56 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti sanksi perpajakan berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena sanksi yang diberikan atas pelanggaran membayar pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan, sanksi tidak kenal kompromi, dan tidak membedakan wajib pajak, serta dapat memberikan efek jera.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap pengetahuan perpajakan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,57 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti pengetahuan perpajakan berada dalam

kriteria yang tinggi. Hal ini berarti wajib pajak merasakan wajib pajak mengetahui tentang pajak, karena mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya, mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat, mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar, serta mengetahui bahwa dalam Undang- Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap pelayanan fiskus, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,83 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti pelayanan fiskus berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena petugas pajak memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak, memberikan kemudahan kepada wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajaknya, petugas pajak memberikan pelayanan dengan baik, cepat, dan tepat, serta selalu berpenampilan rapi dalam

melayani wajib pajak sehingga memberikan kenyamanan kepada wajib pajak.

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,83 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan pajak yang berlaku, Saya selalu mengisi surat pemberitahuan objek pajak dengan lengkap dan benar, selalu membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu, pernah tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu pernah tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu, tidak pernah memiliki tunggakan pajak, dan menyerahkan surat pemberitahuan objek pajak yang sudah terisi ke Dinas Pendapatan Daerah.

b. Model Persamaan

Untuk melihat hasil analisis pengaruh dari keempat variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) terdapat pada tabel dibawah

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas
Konstanta	0.498		.210
Kesadaran wajib pajak	0.206	1.261	0.000
Sanksi perpajakan	0.165	3.984	0.000
Pengetahuan perpajakan	0.219	5.281	0.000
Pelayanan Fiskus	0.315	4.968	0.000
F hitung		26.471	
R <sup>2</sup>		0.502	

Sumber : Data hasil regresi, 2017.

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 0,498 + 0,206 X_1 + 0,165 X_2 + 0,219 X_3 + 0,315 X_4$$

c. Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>) dan Uji F  
Koefisien determinasi berganda menunjukkan besarnya persentase pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel

terikat. Besarnya koefisien determinasi dari nol sampai satu. Semakin mendekati nol besar koefisien determinasi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel

terikat. Sebaliknya semakin mendekati 1, semakin besar pula pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari Tabel 4.10 juga dapat diketahui koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,502. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,502, maka dapat diartikan bahwa 50,2% Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Sedangkan sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

#### d. Uji t

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui nilai  $t_{hitung}$  dan nilai probabilitasnya untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya dengan tingkat signifikansi 0,05.

##### a. Pengujian t hitung pada Variabel Kesadaran Wajin Pajak ( $X_1$ )

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) terdapat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,984 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,6595 yang berarti  $3,984 > 1,6595$ . Nilai tersebut dapat membuktikan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel kesadaran wajib pajak secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, **dengan demikian hipotesis pertama terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Banyu Utomo (2011) menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### b. Pengujian t hitung pada Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) terdapat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,281 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,6595 yang berarti  $5,281 > 1,6595$ . Nilai tersebut dapat membuktikan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel sanksi perpajakan secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, **dengan demikian hipotesis kedua terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Laura Yohana, (2016) tentang menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### c. Pengujian t hitung pada Variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_3$ )

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) terdapat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,968 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,6595 yang berarti  $4,968 > 1,6595$ . Nilai tersebut dapat membuktikan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, **dengan demikian hipotesis ketiga terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Banyu Utomo, (2011) menunjukkan secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### d. Pengujian t hitung pada Variabel Pelayanan Fiskus ( $X_4$ )

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus ( $X_4$ ) terdapat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,875 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,6595 yang berarti  $3,875 > 1,6595$ . Nilai tersebut dapat membuktikan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel pelayanan fiskus secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, **dengan demikian hipotesis keempat terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam dan Dewi, (2015) menunjukkan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap



tertib peraturan, pemahaman tentang pajak, tidak menunggak pembayaran, dan kepercayaan penuh terhadap aparat pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tidak harus menjadi ahli perpajakan masyarakat hanya harus mengetahui dahulu hal mendasar tentang pajak, mengetahui cara membayar pajak, cara menghitung pajak, sanksi pajak, dll. Ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhannya masyarakat kota Yogyakarta juga semakin tinggi. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat.

- Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.
- Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB diantaranya dalam menentukan PBB, penetapan SPPT telah adil sesuai dengan yang seharusnya, fiskus memperhatikan terhadap keberatan terhadap pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak di bidang perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam pembayaran PBB. Hal ini berarti semakin baik pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.

## REFERENSI

- Anna Pertiwi. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib perpajakan ((Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees). Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Andi Abdillah. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makasar. Universitas Hasanuddin.
- Apriani Purnamasari, Sukirman, dan Umi Pratiwi. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB:P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.
- Aprilia Permatasari dan P. D'yan Yaniartha. 2012. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Universitas Udayanan Bali.
- Aulia Rahmanita. 2017. Pengaruh Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Arief Rachman. 2009. Pengaruh pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kecamatan kota Sumenep kabupaten Sumenep.
- Banyu Ageng Wahyu Utomo. 2011. Pengaruh Sikap, kesadaran wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan pamulang kota

- Tangerang Selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Christella Pradista Riyana dan Putri Erly Suandy. 2015. Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di Kota Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra Tax & Accounting Review* volume 1 nomor 13.
- Doni Sapriadi. 2013. Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada kecamatan Selupu Rejang. Program studi akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO – 2016* ISSN: 2337 – 4349
- Fitriana Suwardi. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Hana Oktaviani. 2011. Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Harjanti Puspa Arum. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap).
- Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS, Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Imam Oktafiyanto dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi* Volume 3 Nomor 1 Juni 2015.
- Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, Wayan Cipta. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.*
- Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, Wayan Cipta. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Komang Sastra Guna Wiratama, Siti Khairani dan Icha Fajriana. 2015. Pengaruh tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pekerjaan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (studi kasus wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Palembang Ilir Barat).
- Laura Yohana. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas

- Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bukittinggi.
- Leni Samira. 2015. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal AKUNIDA* volume 1 nomor 1, Juni 2015
- Lian Ade Saputra, Rika Kharlina Ekawati, dan Icha Fajriana. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. STIE MDP Palembang.
- Lusia Rohmawati, Prasetyono, dan Yuni Rimawati. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.
- Meri Tiara dan Siti Khairani. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak restoran terhadap self assessment system studi kasus di dinas pendapatan kota Palembang.
- Muhammad Sairi, Taufik Kurrohman, dan Andriana. 2014. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo.
- Muslikhatul Ummah. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, Pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia.
- Nafilah. 2013. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin.
- Nilu Puspita. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kecamatan Padang Utara). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Nur Murdliatin, Siti Ragil, dan Handayani Sunarti. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ( studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di unit pelaksana teknis dinas pendapatan provinsi Jawa Timur Malang Kota. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)* | Vol. 5 No. 2 2015.
- Pertiwi Kundalini. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Temanggung tahun 2015. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwanti. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Riza Aditya, Anwar Made, dan Eris Dianawati. 2016. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara. Universitas Kanjuruhan Malang.

- Risky Widowati. Kepatuhan Wajib Pajak melalui sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Fiskus. *Falkutas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- Siska Noviyanti, Rizal Effendi, dan Christina Yunita W. 2015. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan ketegasan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP (studi kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang).
- Soraya, Dhabtun Nafsi. 2014, Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sri Putri Tita Mutia. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi. (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Universitas Negeri Padang.
- Surya Arisman. 2015. Analisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Zepri Dwi Yuwono. 2015. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri. Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Tabel 1.1

Rangkuman Tiga Jurnal Relevant

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Judul: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya				
1	Cindy Joto Purnomo & Yenni Mangoting (2013)	<p><b>Variabel Terikat:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p><b>Variabel Bebas:</b> Kesadaran wajib pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada.</p>	Regresi Berganda	kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.
Judul: Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral & Sanksi Perpajakan pada kepatuhan WP Hotel di Dispenda Denpasar				
2	I Putu Adi Putra Sanjaya (2014)	<p><b>Variabel Terikat:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.</p> <p><b>Variabel Bebas:</b> Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan.</p>	Statistik Deskriptif dan Analisis Regresi Linear Berganda, yang di dahului dengan uji asumsi klasik, di olah dengan program SPSS	kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Judul: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Yogyakarta				
3	Andrea Meylita Widyasti Parera & Teguh Erawati (2017)	<p><b>Variabel Terikat:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Bumi &amp; Bangunan.</p> <p><b>Variabel Bebas:</b> Kesadaran wajib pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus.</p>	Statistik Deskriptif dan Analisis Regresi Linear Berganda	Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan tiga jurnal diatas, diketahui variabel-variabel yang diteliti oleh para penulis menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.

Penelitian seperti di atas dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan variabel dan atau dengan memperluas *scope* penelitian misalnya dengan menambah jumlah sampel penelitian.

Di sisi lain, data dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang menunjukkan adanya peningkatan jumlah tunggakan dari sumber pajak daerah terbesar kedua di Kota Palembang yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

**Rekap Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang  
Tahun 2018-2020**

Tahun	Jumlah Objek Pajak Menunggak	Jumlah Tunggakan (Rp.)
2020	62.046	111.668.643.124
2019	59.981	109.599.732.686
2018	48.923	26.545.782.136

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Bertitik tolak dari jurnal yang relevan di atas dan fakta yang terjadi di tempat kerja, maka Penulis tertarik untuk melakukan **Analisis Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Pembangunan Daerah, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang**. Khususnya kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, diharapkan hasilnya bisa menjadi suatu informasi yang penting terutama dalam membuat kebijakan penggalan potensi perpajakan di BPPD Kota Palembang serta bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar sehingga mencapai target penerimaan.

Penelitian kali ini lebih memfokuskan penelitian pada skala mikro, yaitu mencoba melihat pengaruh keberhasilan perpajakan khususnya PBB dengan melihat dari sisi wajib pajaknya. Hal inilah yang

membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Namun demikian, beberapa variabel maupun instrument penelitian yang pernah digunakan peneliti sebelumnya, sebagian tetap digunakan dalam penelitian ini. Variabel tersebut antara lain seperti sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus. Satu variabel yang belum diteliti dalam jurnal relevan di atas yaitu sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah.

Alasan memilih sumber pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan karena jumlah wajib pajak PBB besar, terbanyak dibandingkan wajib pajak lain.



Review hubungan tiga jurnal diatas dengan judul proposal tesis yang akan saya kembangkan yaitu ketiga jurnal tersebut sama-sama meneliti tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan yang relevant dengan judul proposal tesis saya yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Mesitech Mitra Purnabangun. Sehingga dapat menjadi acuan dalam penelitian yang akan saya kembangkan.

Judul jurnal :

1. - Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan level pelaksana di divisi Operasi PT Pusri Palembang.
  - Penulis : Kiki cahaya setiawan
  - Masalah : seringnya karyawan datang terlambat
  - Tujuan : untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan
  - Metode penelitian : jenis penelitian kuantitatif, Teknik Pengumpulan Data ; Observasi, Wawancara, Dokumentasi , Kuisisioner
  - Alat analisis menggunakan statistik (path analysis) Liserel 8.50
  - hasil penelitian : motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 26,86 %
2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Sejahtera Motor Gemilang.
  - Penulis : Olivia Teodera
  - Masalah : karyawan jarang masuk
  - Tujuan : untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan
  - Metode penelitian : jenis penelitian kuantitatif Teknik Pengumpulan Data ; Observasi, Wawancara, Dokumentasi , Kuisisioner
  - Alat analisis menggunakan statistik spss windows 18
  - hasil penelitian : motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 44,9%

3. Pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Karman Putra Andalan Surabaya.

- Penulis : Eldo Herlambang gartjito
- Masalah : kurangnya semangat karyawan saat bekerja dan kerusakan mesin
- Tujuan : untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan
- Metode penelitian : jenis penelitian kuantitatif Teknik Pengumpulan Data ; Observasi, Wawancara, Dokumentasi , Kuisisioner

Alat analisis menggunakan statistik spss windows 15.0

- hasil penelitian : motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 66%

## UJIAN SEMESTER

### MATA KULIAH: METODELOGI PENELITIAN

NAMA : YUNITA PANGGABEAN

NIM : 202510038

#### SOAL :

1. 3 jurnal yang relevant dengan tema atau judul yang saudara pilih, dan lakukan review terkait hubungannya dengan judul/tema penelitian anda

JAWAB:

1. Rencana Judul yang saya pilih adalah ANALISA KEBUTUHAN FUNGSIONAL DOSEN PADA POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP PALEMBANG

3 Jurnal yang relevant yaitu :

1. **MANAJEMEN PENDIDIK DI SMAIT QARDHAN HASANA BANJARBARU DAN SMA DARUL HIJRAH PUTRA MARTAPURA**

Noor, Hasan Fahrian (2020) *MANAJEMEN PENDIDIK DI SMAIT QARDHAN HASANA BANJARBARU DAN SMA DARUL HIJRAH PUTRA MARTAPURA*. Tesis, Pasca Sarjana.

Dari jurnal di atas mempunyai relevant tema dengan rencana judul yang saya ambil yaitu membahas tentang manajemen tenaga pendidik dan Mengetahui Faktor pendukung dan kendala serta solusi terhadap pelaksanaan manajemen pendidik.

2. **Manajemen Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Madrasah**

*Hidayat Maskur, Purwanto Purwanto, Siti Choiriyah*

Dari jurnal di atas mempunyai relevant tema dengan rencana judul yang saya ambil yaitu Penelitian rencana menggunakan metode *fenomenologis*, yaitu penelitian yang menekankan pada identifikasi esensi pengalaman manusia tentang fenomena seperti yang dijelaskan oleh informan. Penelitian kualitatif memungkinkan spontanitas dan adaptasi interaksi antara peneliti dengan partisipan.

3. **MANAJEMEN TENAGA PENDIDIK DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL**

*Ima Muslimatul Amanah, A. Heris Hermawan, Wahyu Hidayat*

Dari jurnal di atas mempunyai relevant tema dengan rencana judul yang saya ambil yaitu untuk mengetahui bagaimana proses manajemen tenaga pendidik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, teknik wawancara baku terbuka, dan teknik studi dokumentasi.